



WWF®

LAPORAN

INT

2013



MEMBANGUN REDD+ UNTUK  
**RAKYAT**  
**DAN ALAM:**

dari pengalaman Indonesia,  
Peru dan Republik Demokrasi Kongo  
menuju visi baru REDD+

PROGRAM HUTAN DAN IKLIM

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	1
PENDAHULUAN .....	3
LAPORAN DARI LAPANGAN:	
PERU .....	6
INDONESIA .....	20
REPUBLIK DEMOKRASI KONGO .....	34
DAMPAK DAN KECENDERUNGAN .....	48
KESIMPULAN .....	66
SUMBER-SUMBER BACAAN TENTANG REDD+ .....	68



## PENGANTAR

WWF-GAONRICHARD STONEHOUSE



**F**luas hutan meliputi sepertiga permukaan Bumi dan memberi kehidupan bagi dunia, dengan 40 persen oksigen dunia berasal dari hutan-hutan tropis saja. Hutan juga merupakan gudang penyimpanan karbon terbesar setelah lautan, menyimpan 289 giga ton karbon, lebih dari seluruh karob yang ada di atmosfer. Karenanya tidak mengejutkan bahwa ketika kita merusak hutan-hutan itu, kita juga melepaskan karbon dalam jumlah sangat besar ke atmosfer sehingga mempercepat perubahan iklim yang merusak –mencapai 20 persen dari emisi global tahunan dan melampaui seluruh karbon yang dilepas oleh sektor transportasi di seluruh dunia.

Namun bukan hanya planet kita ini yang menderita ketika hutan-hutan dihancurkan. Karena hutan adalah rumah bagi lebih dari 80 persen keragaman hayati di bumi, deforstasi pada hutan-hutan tropis yang utama bisa menyebabkan musnahnya paling tidak 100 spesies per hari. Dan, dengan lebih dari 1.6 miliar penduduk bumi yang secara langsung tergantung kepada hutan untuk bahan bakar, perumahan dan makanan, nasib hutan-hutan kita dapat menentukan nasib kita juga.

Seluruh tantangan itu dapat diatasi dengan REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries, conserving and sustainably managing forests, and enhancing forest carbon stocks*). Jika dilaksanakan dengan benar, melalui perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat dan lokal, REDD+ dapat membawa manfaat bagi iklim, keragaman hayati, penghidupan masyarakat lokal dan melampaui inisiatif-inisiatif pelestarian hutan tradisional.

Dengan keyakinan itulah, WWF bertekad untuk mewujudkan pelestarian dan manfaat penghidupan dari REDD+

Sebagai bagian dari komitmen itu, WWF yakin bahwa REDD+ tidak hanya harus diakui di tingkat global tetapi juga harus didefinisikan dan dimiliki secara nasional oleh negara-negara hutan tropis, dan di tingkat lokal oleh komunitas-komunitas yang secara langsung mengalami dampaknya.

Hal itu telah membawa *Forest and Climate Strategy* dari WWF dan pelaksanaan berbagai kegiatan terkait REDD+ dari mitra pengembangan REDD+ Five Guiding Principles (lihat halaman 5), yang saat ini membantu menetapkan standar untuk REDD+ yang bertanggungjawab, untuk memudahkan keterlibatan komunitas adat dan lokal dalam dialog-dialog dan pembuatan keputusan REDD+.

Keyakinan itu juga menentukan peran tim WWF yang menjadi pelaksana nasional berbagai kegiatan terkait REDD+ di berbagai kawasan hutan tropis, dan peran fasilitasi dari Tim Hutan dan

Iklim WWF di tingkat global dalam memberikan panduan teknis dan dukungan kepada pihak-pihak yang melaksanakan REDD+ di lapangan dan menghubungkan program-program nasional dengan ruang poltiik dan kebijakan global.

Selama tiga tahun terakhir, dengan dukungan keuangan dari pemerintah Norwegia, WWF telah mencapai kemajuan berarti dalam membantu negara-negara hutan tropis untuk menyiapkan REDD+. Hal ini termasuk mendukung para pemangku kepenringan REDD+ di kawasan-kawasan hutan yang penting di Indonesia, Peru dan Republik Demokrasi Kongo ketika mereka mengembangkan pengetahuan dan keahlian yeknis yang dibutuhkan untu merancang dan menguji strategi REDD+. Publikasi ini memaparkan keberhasilan dan tantangan yang ditemui selama tiga tahun itu.

Bukan sekadar berisi laporan, publikasi ini merupakan refleksi dari program itu. Refleksi ini telah menemukan sejumlah pelajaran yang sangat bernilai –pelajaran yang bisa membantu upaya REDD+ di kawasan hutan tropis lainnya yang mendukung strategi REDD+ yang efektif dan bertanggungjawab dan, mungkin yang paling penting, memperkuat nilai dari REDD+ bukan hanya sebagai alat konservasi tetapi juga alat pembangunan.

Hubungan antara REDD+ dan tujuan-tujuan pembangunan bukanlah hal baru, tetapi lebih dari sebelum nya, saat ini hal itu sangat penting bagi kesuksesannya. Tantangan yang tengah dihadapi hutan-hutan tropis membutuhkan visi baru REDD+ sebagai instrumen kritis untuk mendukung konsep pembangunan ekonomi ramah lingkungan (*gree economic development*). Inilah visi inovatif untuk REDD+ yang tengah diupayakan oleh WWF, yang akan mengaitkan upaya-upaya pelestarian dan pembangunan dengan cara-cra transformasi yang menjanjikan manfaat sesungguhnya bagi hutan-hutan kita, iklim kita dan jutaan orang di seluruh dunia yang kehidupannya bergantung kepada keberlangsungan kedua hal itu.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruce Cabarle'.

Bruce Cabarle  
Ketua, Inisiatif Hutan dan Iklim WWF (2010-2013)

# PENDAHULUAN

Membalik proses deforestasi kawasan tropis untuk menurunkan emisi karbon hutan sangat krusial dalam menjawab masalah perubahan iklim. Publikasi ini melaporkan upaya-upaya penyelamatan hutan dan iklim WWF di tingkat kawasan pada periode 2010-2013, sebagaimana didukung oleh dana Norad. Kerja ini berupaya mengembangkan model-model pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+) untuk memastikan pengelolaan ekosistem hutan secara terukur, dengan melibatkan komunitas-komunitas yang hidup dan bergantung kepada hutan dengan tujuan memperbaiki penghidupan mereka.

Kerja ini telah dilaksanakan di tiga kawasan hutan tropis penting dengan luas 15.5 juta hektar; kawasan Mai-Ndombe di Republik Demokrasi Kongo(DRC), Kabupaten Kutai Barat, East Kalimantan, Indonesia dan kawasan Madre de Dios, Peru. Kawasan-kawasan itu dipilih karena semuanya menghadapi ancaman kehancuran yang serius namun menjanjikan masa depan yang luar biasa.

Seluruh kawasan itu adalah sebagian dari hutan-hutan tropis paling penting di dunia dan sangat terancam di tiga dari lima negara dengan hutan tropis terbesar di bumi dan tiga blok hutan tropis terbesar; Amazon, Kalimantan dan Cekungan Kongo (*Congo Basin*), dengan

potensi pengurangan emisi karbon paling besar. Keragaman kondisi sosial, politik, geografi dan ekologi antar tiga kawasan itu hutan itu juga memberikan peluang untuk menguji pendekatan-pendekatan REDD+ secara komprehensif, untuk belajar dari keberhasilan dan tantangan yang nyata dari upaya melaksanakan REDD+ sebaik mungkin.

Pekerjaan di kawasan itu dilaksanakan dengan skala intervensi yang saling berpotongan dan saling memperkuat pada tingkat kawasan (atau subnasional) dan komunitas yang mendukung kebijakan REDD+ nasional – menciptakan pendekatan yurisdiksi/subnasional yang inovatif untuk REDD+. Kekuatan dari pendekatan ini ada pada kemampuannya membawa perubahan pada blok-blok hutan yang cukup besar untuk mempertahankan ekosistem, dengan bekerja di dalam yurisdiksi pemerintah, seperti provinsi atau kabupaten. Hal ini memastikan pelaksanaan REDD+ dapat dikelola oleh atau melalui kemitraan dengan pemerintah di tingkat nasional atau subnasional, sehingga cocok dengan perencanaan pembangunan ekonomi dan kehutanan pemerintah, dan dapat dilaksanakan pada skala yang cukup besar untuk membawa perubahan secara hayati maupun sosial. Dari sini, kerja di tingkat *yurisdiksi/subnasional* bisa diperluas ke skala yang jauh lebih besar, dengan pelajaran dan dukungan dari kerja di tingkat yurisdiksi/subnasional. Kerja ini juga diupayakan untuk berkait dengan kebijakan dan keuangan global dan untuk terus merawat peluang belajar lintas kawasan di Selatan-Selatan.



© WWF/SIMON RAWLESS

## DEFORESTASI DAN DREGRADASI HUTAN NETO NOL (ZERO NET DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ZNDD)

WWF mendefinisikan ZNDD sebagai tidak ada kehilangan hutan netto dan tidak ada penurunan mutu hutan karena degradasi. ZNDD menawarkan sejumlah fleksibilitas yang samasekali berbeda dari tidak ada pembukaan hutan di manapun dalam kondisi apapun. Misalnya, ZNDD mengakui hak masyarakat adat membuka beberapa bagian hutan untuk pertanian, atau sesekali menerima "tukar guling" antara hutan yang menurun mutunya untuk membebaskan lahan lain untuk memulihkan koridor biologi yang penting (trade off), dengan syarat bahwa nilai keragaman hayati dan kuantitas dan kualitas neto hutan tetap dipertahankan.



*Forest and Climate Initiative (FCI) WWF, saat ini disebut **Forest and Climate Programme**, memandu kerja ini, dengan perencanaan dan pelaksanaan bersama dalam kemitraan dengan ahli-ahli setempat dan tim lapangan WWF di **DRC, Peru dan Indonesia, dan mitra-mitra mereka.***

Kerja ini memiliki tiga tujuan utama:

**Meningkatkan manfaat REDD+ bagi masyarakat adat dan komunitas lokal** — Memastikan masyarakat adat dan lokal berdaya untuk terlibat dalam implementasi REDD+, dan setiap tahapan REDD+ menjawab persoalan hak-hak mereka melalui berbagai cara pengurangan kemiskinan dan memberi masukan kebijakan REDD+ di tingkat nasional maupun internasional.

**Mengembangkan model kawasan-kawasan zero net deforestation (ZND)** — Memperlihatkan jalur yang benar menuju ZND dalam mengelola simpanan karbon secara efektif dan nilai konservasi hutan lain dengan memberi manfaat bagi komunitas adat dan lokal, untuk mencapai target global ZNDD pada tahun 2020.

**Mempengaruhi kebijakan dan pembiayaan REDD+ di tingkat internasional** — Mengamankan komitmen nasional dan internasional, dan skema pendanaan dan kelembagaan REDD+ untuk mendukung pelestarian keragaman hayati dan memajukan kehidupan masyarakat adat dan lokal.

Untuk mencapai semua sasaran itu, sejumlah strategi telah diidentifikasi dan diadopsi, antara lain:

- Mengakui dan melaksanakan hak-hak, pengetahuan, keterampilan, dan keterlibatan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan proyek REDD+ dan pengelolaan hutan;
- Sistem pemantauan karbon yang efektif dan dapat diakses;
- Perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan dan partisipatif;
- Model-model kesiapan REDD+ yang terukur;
- Sertifikasi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan pertanian dan kehutanan;
- Sistem kawasan lindung yang diperkuat;
- Komitmen yang nyata terhadap ZNDD;
- Mekanisme dan kebijakan pendanaan nasional dan internasional yang efektif untuk REDD+;
- Alat-alat, metode dan pelajaran bersama.

Kerja ini dilakukan dengan panduan *REDD+ Five Guiding Principles* – prinsip-prinsip yang dirancang bersama oleh WWF, Care International dan Greepeace. Prinsip-prinsip ini menetapkan acuan global untuk keberhasilan REDD+ dengan memastikan bahwa, sebagai bagian dari proses REDD+, lima masalah ini ditangani; iklim, keragaman hayati, penghidupan, hak-hak masyarakat lokal dan adat (*indigenous peoples and local communities, IPLCs*), dan pendanaan yang efektif dan adil.

Laporan ini memberikan gambaran ringkas dari berbagai tantangan, pelajaran dan dampak dari kerja di tiga kawasan. Laporan ini juga bercermin dari seluruh kerja itu, mengenali kecenderungan utama dan peluang-peluang perluasan dari berbagai aspek kerja ini untuk dampak yang lebih besar, dalam kaitannya dengan kebijakan dan pembiayaan global.

Laporan ini juga memberikan perspektif masa depan yang akan dituju REDD+, dengan dasar berbagai pengalaman yang didapat dari kerja ini. Pelajaran dari tiga kawasan itu telah meletakkan tahapan kemajuan dari REDD+ menuju konsep “ekonomi hijau” – sebuah visi yang lebih luas dari REDD+ yang dapat secara efektif mewujudkan manfaat potensialnya bagi masyarakat dan alam melalui cara-cara transformasi.

# LIMA PRINSIP REDD+



**1. IKLIM.** REDD+ menyumbang secara nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dengan sasaran nasional yang diarahkan menuju tujuan global.



**2. KERAGAMAN HAYATI.** REDD+ selalu menjaga dan/atau meningkatkan keragaman hayati dan manfaat ekosistem hutan.



**3. PENGHIDUPAN.** REDD+ menyokong pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan memajukan penghidupan komunitas-komunitas yang bergantung kepada hutan.



**4. HAK-HAK.** REDD+ mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan lokal.



**5. PENDANAAN YANG ADIL DAN EFEKTIF.** REDD+ menggerakkan sumber-sumber yang dapat diperkirakan, cepat dan memadai untuk kerja di wilayah hutan prioritas dengan cara yang adil, transparan, partisipatif dan terkordinasi.

LAPORAN DARI LAPANGAN

# PERU

## PERU DALAM ANGKA

25,000

SPESIES TUMBUHAN



1,736

SPESIES BURUNG



700

SPESIES REPTIL  
DAN AMFIBI



44

SUKU-SUKU PENGHUNI  
KAWASAN AMAZON DI PERU



68,000,000

HEKTAR TUTUPAN  
HUTAN



## STATUS REDD+ DI PERU

HUTAN HUJAN DI CEKUNGAN SUNGAI AMAZON MENYELIMUTI LEBIH DARI SEPARUH BAGIAN **PERU**, DENGAN KERAGAMAN HAYATI YANG HANYA BISA DITANDINGI OLEH SEDIKIT SEKALI TEMPAT LAIN DI BUMI.



- Memastikan kemitraan dengan WWF, Conservation International, lembaga riset dan universitas setempat, dan organisasi lain untuk mengembangkan kapasitas, strategi dan dukungan bagi kesiapan REDD+ negara itu;

- Menrima dukungan sebagai negara rintisan dalam program investasi hutan (*Forest Investment Program, FIP*), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam mengatasi berbagai penyebab deforestasi dan degradasi hutan;

- Bermitra dengan WWF pada tahun 2010 untuk melaksanakan program kerja REDD+ di kawasan Madre de Dios.

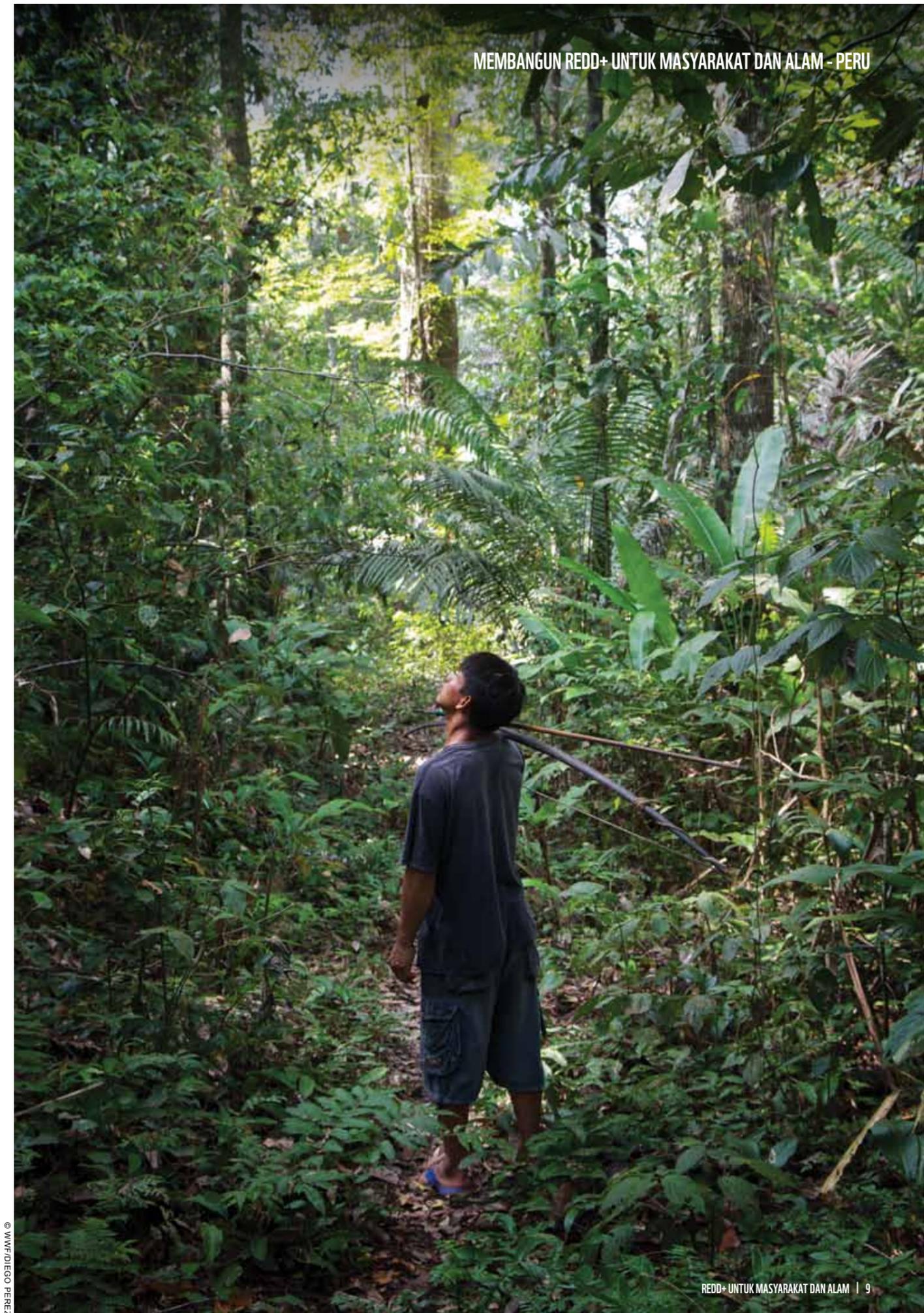
Namun, semakin cepatnya deforestasi dan degradasi hutan mengancam kekayaan hayati itu. Tidak kurang dari 150.000 hektar hutan Peru musnah setiap tahun karena penebangan liar, penambangan emas dan perluasan kawasan pertanian – sedangkan kenaikan populasi penduduk dan tekanan pembangunan justru meningkatkan intensitas masalah itu.

- Meluncurkan Program Nasional Pelestarian Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim (*National Forest Conservation Program for Climate Change Mitigation*) yang secara garis besar menjelaskan sasaran-sasaran pelestarian negara itu dan dukungan terhadap perbaikan pengelolaan hutan berkelanjutan;

Pemerintah Peru mulai melihat REDD+ sebagai penyelesaian yang mungkin, pada tahun 2008 mengumumkan niat mereka untuk mempertahankan 54 juta hektar hutan dan menurunkan tingkat deforestasi bersih menjadi nol pada tahun 2021. Pemerintah Peru kemudian memutuskan untuk mengembangkan strategi dan kerangka kerja untuk kesiapan REDD+, antara lain;

- Mentapkan Kementerian Lingkungan Hidup (*Ministry of Environment, MINAM*) dan Kepentrian Pertanian (*Ministry of Agriculture, MINAG*) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga nasional, internasional, subnasional dan lembaga publik maupun privat untuk mendukung kesiapan REDD+;

Meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat global, kesiapan REDD+ di Peru menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya yang kapasitas teknis untuk memantau kondisi hutan-hutan Peru, rendahnya keterlibatan komunitas adat dan lokal dalam perencanaan dan pembuatan keputusan REDD+, dan kekhawatiran mengenai REDD+ yang tidak memberi manfaat, mengakui atau menghargai hak-hak masyarakat adat. Dengan semua tantangan itu, WWF mengawali program REDD+ di Madre de Dios yang luasnya dua kali Denmark, terbentang di sisi selatan Amazon di Peru.



## WILAYAH-WILAYAH KUNCI PROGRAM MADRE DE DIOS

Sungai Madre de Dios, salah satu anak Sungai Amazon, mengalir melalui kawasan hutan hujan di dataran rendah di kawasan Amazon Peru. Bentangan seluas 8.5 juta hektar ini disebut daerah Madre de Dios, yang merupakan tempat terbesar berkumpulnya berbagai spesies burung, sejumlah hewan dan tanaman langka yang terancam punah, dan beberapa komunitas adat, termasuk yang hidup mengasingkan diri.

Kawasan ini dibelah oleh Inter Oceanic Highway, yang menghubungkan pesisir Samudra Pasifik dan Atlantik melalui Peru dan Brazil, dan telah meningkatkan migrasi manusia dan pembangunan berbagai wilayah hutan yang sebenarnya sudah terdesak oleh kegiatan pertanian, penebangan dan pertambangan emas. Madre de Dios juga didera berbagai guncangan politik, termasuk perubahan yang tengah berjalan di pemerintahan daerahnya (*Gobierno Regional de Madre de Dios, GOREMAD*).

Upaya-upaya REDD+ WWF di Madre de Dios secara khusus bermaksud menjawab tantangan-tantangan itu melalui sebuah pendekatan REDD+ yang inklusif dan terpadu.

Untuk mencapai sasaran itu, program ini mengambil fokus pada beberapa wilayah kerja;

**Kapasitas teknis.** Mengembangkan kapasitas-kapasitas lokal dan sumber-pelatihan untuk menerapkan dan melanjutkan REDD+ di Madre de Dios dan untuk mengukur dan memantau emisi regional, deforestasi dan degradasi hutan sepanjang waktu.

**Komunitas-komunitas adat dan lokal.** Melibatkan dan memberdayakan komunitas adat penghuni hutan sehingga mereka mampu terlibat secara efektif dalam pengembangan REDD+ dengan persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan (*PADIATAPA*)

**Proses-proses partisipatif.** Inklusi dan pelibatan publik dalam implementasi REDD+ melalui komite-komite masyarakat dan forum-forum dialog.

**Tata kelola.** Bekerja dengan pejabat pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan dukungan bagi REDD+

## PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA DAN KEMITRAAN DI MADRE DE DIOS

Partisipasi telah menjadi inti dalam keberhasilan program di Madre de Dios. Sejak awal, program itu telah berupaya melibatkan dan memadukan berbagai sudut pandang, nilai-nilai dan pengetahuan untuk membangun pendekatan REDD+ yang paling efektif dan inklusif di daerah ini.

Namun, keadaan Madre de Dios ternyata rumit; sejumlah lembaga pemerintah, GOREMAD di tingkat daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup (MINAM) di tingkat nasional, juga berbagai organisasi lingkungan hidup, kelompok-kelompok petani dan pekebun, dan komunitas-komunitas lokal dan adat yang bergantung kepada hutan, semuanya memiliki kepentingan terhadap hasil REDD+ di wilayah itu.

WWF telah diakui sebagai pendukung utama pelaksanaan REDD+ di Madre de Dios melalui kerjasama lintas sektor, tawaran dukungan teknis dan pengembangan kapasitas dan upaya menjalin kemitraan yang kuat di daerah ini, di mana konsensus bisa sangat sulit dibangun.

### MITRA LANGSUNG DAN PERAN MEREKA:

#### LEMBAGA-LEMBAGA AKADEMIS (UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS - UNAMAD, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY - UNIVERSITY OF LEEDS)

Dukungan teknis, pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk penerapan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*measurement, reporting and verification, MRV*)

#### KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (MINISTRY OF ENVIRONMENT, MINAM)

Integrasi program kerja Madre de Dios ke dalam strategi dan pengawasan REDD+ di tingkat nasional.

#### PEMERINTAH DAERAH MADRE DE DIOS (GOREMAD)

Pengembangan dan implementasi strategi pembangunan dan konservasi daerah, termasuk REDD+

Memimpin forum Dialog mengenai Manfaat Lingkungan Hidup dan REDD+ di Madre de Dios

#### MASYARAKAT DAN ORGANISASI ADAT (FENAMAD, AIDSESP, COICA)

Advokasi atau guna lahan (*land tenure*), hak-hak adat dan asal-usul REDD+; memasukkan perspektif masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) ke dalam dialog dan perencanaan REDD+

#### FORUM MADRE DE DIOS UNTUK MANFAAT LINGKUNGAN HIDUP DAN REDD+ (MSAR)

Resolusi konflik antar pemangku kepentingan, kepemimpinan dan bantuan teknis untuk mendukung pengembangan strategi REDD+ daerah yang inklusif

#### WWF

Memberikan saran teknis dan pengembangan kapasitas untuk implementasi REDD+

#### MASYARAKAT SIPIL (SPDA, AIDER, IAP, DRIS)

Membangun infrastruktur legal, ekonomi dan teknis untuk REDD+

#### DONOR (NORAD, IDB, EU, SALL FAMILY FOUNDATION)

Mendukung investasi pada kegiatan-kegiatan sektoral yang mendukung dan relevan.



© WWF/DIEGO PEREZ



© WWF/DIEGO PEREZ

# KERANGKA WAKTU REDD+ DI MADRE DE DIOS

## 2008

- Peru secara resmi melibatkan diri dalam REDD+

## 2009

- Pembentukan Konsorsium Teknis REDD+ untuk meningkatkan pemantauan sumber daya alam daerah

## 2010

- Workshop awal dan validasi oleh pemangku kepentingan di Madre de Dios.
- WWF mulai terlibat dalam program kerja di Madre de Dios
- Forum Madre de Dios untuk Manfaat Lingkungan Hidup dan REDD+ diaktifkan kembali untuk membangun dialog yang lebih inklusif mengenai kerangka kerja kebijakan REDD+
- Aliansi strategis dengan Toulouse Lautrec Institute menghasilkan video pengantar dan berbagai bahan komunikasi lain mengenai REDD+ di Madre de Dios
- Pengu data dasar karbon dimulai
- Dimulai kerjasama dengan University of Leeds untuk menyusun metode perkiraan biomasa untuk hutan-hutan di Madre de Dios

## 2011

- Program sertifikasi pertama dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manfaat Lingkungan Hidup dengan spesialisasi MRV/ REDD+ diluncurkan melalui kerjasama dengan Amazon National University, Madre de Dios (UNAMAD)
- Panduan kerjasama ditetapkan dengan presiden dan staf baru dari GOREMAD
- Hubungan kerjasama dengan Indigenous Federation of the Madre de Dios River and its Tributaries (FENAMAD) dimulai.
- Hibah Skema Investasi Kehutanan (*Forest Investment Plan, FIP*) untuk Peru disetujui oleh Climate Investment Fund
- Pengembangan proposal untuk merancang dan membentuk otoritas Lingkungan Hidup Daerah yang otonom
- Kantor daerah untuk REDD+ dibentuk di bawah GOREMAD, dan nota kesepahaman antara WWF dan GOREMAD ditandatangani
- Analisis praktik penggunaan lahan, skenario-skenario masa depan dan rencana aksi untuk menuju ZND di Madre de Dios dilakukan.

## 2012

- Rencana pengembangan kapasitas disusun dengan dukungan WWF
- Pemerintah Daerah Madre de Dios mengakui Forum untuk Manfaat Lingkungan Hidup dan REDD+, dan menyetujui aturan mengenainya dalam sebuah peraturan daerah
- Madre de Dios menjadi anggota Gugus Tugas Hutan dan Iklim Provinsi (*Governors' Climate and Forest Task Force, GCF*)
- Analisis dan pengukuran data dasar karbon dan deforestasi Madre de Dios terus berjalan, empat lokasi diproses dan analisis kepadatan kanopi hutan selesai dikerjakan
- Lokakarya pengembangan kapasitas dilaksanakan untuk pegawai pemerintah dan pembuat kebijakan, masyarakat adat, Forum untuk Manfaat Lingkungan Hidup dan REDD+ dan pemangku kepentingan lain.
- 35 lulusan kursus sertifikasi MRV mulai melatih orang lain mengenai pemantauan dan pengukuran karbon
- Lokakarya-lokakarya yang diselenggarakan oleh WWF dan University of Leeds terus berlangsung untuk menyusun kapasitas MRV dan peta karbon daerah
- Berbagai diskusi dimulai dengan Inter-American Development Bank untuk merencanakan pendanaan REDD+ sebesar US\$120 juta

## 2013

- Amazonian Indigenous REDD+ Roundtable of Madre de Dios diakui oleh GOREMAD melalui sebuah peraturan daerah
- Peta karbon lokal tersusun dengan dukungan teknis dari University of Leeds dan UNAMAD
- Madre de Dios terpilih sebagai satu dari tiga zona pelaksanaan Forest Investment Plan, dengan investasi sebesar US\$12 juta untuk mengurangi deforestasi dan memperbaiki pengelolaan hutan di daerah itu
- Madre de Dios menjadi tuan rumah Governors' Climate and Forest Task Force (GCF) tahun 2013.



Emisiones  
Wichacha Pija



# MASYARAKAT-MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL



© WWF/DIEGO PEREZ

**Madre de Dios adalah rumah bagi ribuan penduduk yang bergantung kepada hutan yang secara historis jarang didengar pendapatnya dalam menentukan nasib dan masa depan hutan mereka.**

Kelompok-kelompok itu akan rugi besar jika deforestasi dan degradasi terus berlangsung mencaplok hutan hujan daerah itu, tetapi mereka juga terus menjadi pemelihara hutan yang berperan sangat besar. Upaya-upaya REDD+ dari WWF di Madre de Dios telah mengakui peran vital mereka sejak awal, bekerja untuk memperkuat kapasitas dan mendapatkan wawasan dan cara pandang

mereka untuk menyusun strategi REDD+ yang menguntungkan dan memberdayakan mereka.

Di tengah berbagai masalah yang tidak terjawab seputar tenurial dan hak atas tanah adat yang tidak diakui, masyarakat adat dan lokal telah menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap proses REDD+. WWF telah berkerjasama sangat erat dengan anggota-anggota komunitas adat, seperti *Indigenous Federation of the Madre de Dios River and its Tributaries* (FENAMAD) dan *Coordinating Organization of the Indigenous Peoples of the Amazon Basin* (COICA), untuk menyusun program pengembangan kapasitas yang akan meningkatkan keterlibatan mereka yang lebih luas dalam proses REDD+.

Melalui pelatihan dan bantuan teknis, WWF juga telah mendukung gerakan yang terus tumbuh ke arah *Amazonian Indigenous REDD+* – sebuah pendekatan terhadap REDD+ yang menghargai dan menjamin kebutuhan, hak-hak, visi dan pengetahuan masyarakat adat, dan menghargai manfaat budaya dan manfaat hutan lainnya untuk masyarakat-masyarakat adat. Kerjasama ini mencapai puncaknya dalam pembentukan *Amazonian Indigenous REDD+ Roundtable of Madre de Dios*, yang akan memberikan suara yang lebih kuat bagi masyarakat adat dan lokal dalam penyusunan kebijakan REDD+ di tingkat nasional dan daerah yang mengakui nilai-nilai kultural hutan dan menghormati hak-hak adat atas tanah. Sebagai tanda dukungan, Pemerintah Peru akan mengalokasikan US\$ 14.5 juta sumber keuangan dari dana Forest Investment Program (FIP) untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan hutan dalam wilayah adat, memajukan pengelolaan hutan berbasis komunitas dan memajukan tata kelola hutan di kalangan masyarakat dan organisasi adat di seluruh negeri.

Masyarakat adat dan lokal juga berperan aktif dalam menyusun berbagai strategi untuk pembagian keuntungan dan pembayaran untuk manfaat lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan gagasan untuk berbagai keuntungan non karbon – seperti pelestarian keragaman hayati atau perlindungan mata air—dan pendekatan yang tidak berbasis pasar lainnya.

# PENCAPAIAN DAN DAMPAK

**Program kerja WWF di Madre de Dios telah membawa sejumlah capaian kunci:**

## ■ Kapasitas lokal yang kuat

Penyusunan program sertifikasi MRV/REDD+ yang pertama melalui kerjasama dengan Amazon National University of Madre de Dios membekali basis individu yang tumbuh di pemerintahan, masyarakat sipil, komunitas lokal dan kelompok-kelompok adat dengan perangkat-perangkat teknis untuk memahami dan memperjuangkan REDD+. Kursus-kursus singkat dan modul-modul pelatihan untuk kalkulasi biomasa dan pemantauan karbon juga telah disusun untuk para petani dan teknisi pemerintah.

## ■ Masyarakat adat dan lokal terlibat melalui PADIATAPA

Penjangkauan dan kerjasama dengan komunitas ladat dan lokal yang bergantung kepada hutan, termasuk komunitas di Palma Real, Puerto Arturo dan Sonene, telah membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai proses REDD+ untuk mendukung PADIATAPA, dengan juga memberdayakan organisasi-organisasi adat untuk menjawab masalah itu dan mendapatkan ruang keterlibatan yang lebih besar dalam penyusunan proposal implementasi *Amazonian Indigenous REDD+*.

## ■ Masyarakat-masyarakat adat bersuara

Perwakilan dari masyarakat-masyarakat adat telah membentuk *Amazonian Indigenous REDD+ Roundtable of Madre de Dios* untuk memberi masukan dan mempengaruhi penyusunan berbagai strategi daerah untuk REDD+. Forum yang dibentuk dengan dukungan WWF ini telah diakui oleh Pemerintah Daerah Madre de Dios dan membawa hasil berupa pemilihan daerah itu sebagai lokasi rintisan untuk pelaksanaan *Amazonian Indigenous REDD+*.

## ■ Visi masyarakat adat untuk REDD+ disebarluaskan secara luas di komunitas internasional

Sebuah proposal pelaksanaan *Amazonian Indigenous REDD+*, yang melibatkan *Indigenous Federation of the Madre de Dios River and its Tributaries* (FENAMAD), telah membawa masalah pemanfaatan lahan, tenurial, dan pemantauan perdagangan karbon independen, perlindungan awal dan pengelolaan sumber daya alam yang menyeluruh ke dalam pembicaraan internasional mengenai REDD+.

## ■ Proses partisipasi REDD+ yang diperbarui

Forum Madre de Dios untuk Manfaat Lingkungan Hidup dan REDD+ (*The Roundtable The Madre de Dios Roundtable on Environmental Services and REDD+*), yang dibentuk pada tahun 2009 tetapi tidak fokus pada REDD+, diaktifkan kembali dan dengan cepat menjadi pelaku penting REDD+ di tingkat daerah. Pertemuan-pertemuan bulanan forum itu berhasil mengumpulkan para petani lokal, pengusaha, masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya untuk

berdiskusi dan memberi masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan lebih jauh dari strategi partisipasi dalam REDD+ di tingkat daerah. Selain itu, meskipun ada perubahan dan guncangan politik, forum itu telah mendorong keberlangsungan proses dan kerja teknis. Forum itu juga telah diakui dan dilembagakan oleh Pemerintah Daerah Madre de Dios, dan telah memainkan peran penting dalam penyusunan strategi daerah untuk perubahan iklim dan REDD+ dan dalam perbaikan tata kelola lingkungan hidup. Upaya-upaya forum itu telah membawa hasil, termasuk penusunan struktur tata kelola dan rencana kerja tahun jamak, pembangunan data dasar REDD+, dan pembentukan kelompok-kelompok kerja teknis, legal, kelembagaan, keuangan dan sosial.

## ■ Realisasi konsensus secara partisipatif untuk Otorita Lingkungan Hidup Daerah (*Regional Environmental Authority*)

Sebuah proposal untuk membantu dan melaksanakan sebuah Otoritas Lingkungan Hidup Daerah yang otonom di Madre de Dios disusun melalui proses partisipatif yang didukung WWF, dalam bentuk dukungan dan bantuan teknis. Proposal dan entitas yang akan dibentuk adalah peluang besar untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan untuk menjaga tata kelola yang diamis tetapi efektif, yang sangat penting dalam melawan perubahan iklim.

## PENCAPAIAN DAN DAMPAK LANJUTAN

### ■ Pemerintah lokal berkomitmen terhadap REDD+

Pemerintah Daerah Madre de Dios telah mendukung pengembangan kapasitas dan keriaagaan untuk REDD+ melalui pembentukan biro pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, reorganisasi dari direktorat sumber daya alam, dan asal-muasal pembentukan *Regional Environmental Authority* yang otonom. Upaya WWF di Madre de Dios juga telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengkaji perencanaan tata ruang, strategi perubahan iklim dan rencana pembangunannya.

### ■ Pemantauan tutupan hutan telah berjalan

Sebuah komite teknis yang berisi pemangku kepentingan dari pemerintah lokal dan masyarakat sipil telah menyusun sebuah sistem peringatan dini untuk mendeteksi perubahan temperatur dan muka tanah, termasuk perangkat virtual yang memungkinkan pembaruan data secara online. Laman untuk kerja ini tengah dibangun dan sedang diuji ([www.mrvperu.com](http://www.mrvperu.com)).

### ■ Peta karbon daerah selesai disusun

Dengan dukungan teknis dan pelatihan dari WWF dan University of Leeds, pemerintah lokal, para teknisi dari *Madre de Dios Roundtable on Environmental Services and REDD+*, dan anggota komunitas menyusun peta karbon daerah yang berisi analisa terhadap lebih dari 600 plot vegetasi. Proses kolaboratif ini juga akan berfungsi sebagai dasar penyusunan peta deforestasi historis.

### ■ Keberlangsungan yang terjaga meskipun ada perubahan politik

Perubahan-perubahan politik yang telah sejak awal proyek (termasuk dia presiden, tiga menteri lingkungan hidup, tiga pimpinan daerah dan lima manajer sumber daya alam) merupakan tantangan besar pelaksanaan REDD+. Meskipun ada perubahan-perubahan itu, Pemerintah Daerah Madre de Dios tetap ada dalam kepemimpinan REDD+ berkat dukungan *Madre de Dios Roundtable on Environmental Services and REDD+* dan dukungan teknis yang terus-menerus dari WWF.



© WWF/DIEGO PEREZ

## TANTANGAN

Sekalipun telah membuat sebuah loncatan besar, upaya-upaya REDD+ di Madre de Dios menghadapi tantangan-tantangan besar sebagai berikut:

- Instabilitas dan perubahan politik di Pemerintah Daerah Madre de Dios telah menunda proses REDD+, membatasi keterlibatan pemerintah dalam *Madre de Dios Roundtable on Environmental Services and REDD+* dan memperlambat pembentukan *Regional Environmental Authority* yang otonom dan langkah kunci lainnya dalam pelaksanaan REDD+.
- Para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan REDD+ di daerah Madre de Dios berbeda-beda dalam hal pandangan dan perspektif, sehingga pembuatan keputusan dan pembentukan konsensus selalu makan waktu.
- Melibatkan masyarakat adat dalam REDD+ selalu sulit dan memaksa *Indigenous Federation of the Madre de Dios River and its Tributaries* (FENAMAD) dan mitra lain untuk lebih banyak terlibat daripada yang mungkin diharapkan.

- Pendanaan yang terbatas telah menghambat kinerja beberapa bagian dari program kerja Madre de Dios, termasuk upaya untuk memperkuat *Amazonian Indigenous REDD+* di daerah itu.

- Madre de Dios kekurangan orang-orang yang menguasai aspek-aspek teknis REDD+ dan sering terjadi pergantian staf teknis di pemerintah daerah. hal ini menjadikan upaya-upaya pengembangan kapasitas makan waktu dan biaya lebih besar daripada yang direncanakan.

- Ada kebutuhan untuk memperbaiki strategi komunikasi dan penjangkauan untuk melibatkan lebih banyak komunitas dan pemangku kepentingan, khususnya para penduduk kawasan hutan, dalam *Madre de Dios Roundtable on Environmental Services and REDD+* dan proses-proses partisipasi lainnya.

- Membuat suara komunitas didengar adalah capaian besar; menjamin suara mereka tidak dikalahkan oleh suara organisasi dan kelompok lain ketika makin banyak organisasi dan kelompok yang terlibat dalam REDD+ sangatlah vital dan menantang.

- Program REDD+ di tingkat nasional tertinggal dibanding upaya dan pencapaian program di Madre de Dios.

- Pertambangan dan kerajinan emas skala kecil di lembah sungai Amazon di Peru terus berkembang, sehingga menjadi ancaman serius bagi daerah konservasi dan sumber air yang penting di seluruh kawasan.

# PELAJARAN DARI LAPANGAN



Berbagai tantangan dan keberhasilan upaya REDD+ dari WWF di Madre de Dios memberikan sejumlah pelajaran penting:

- Komunitas-komunitas lokal perlu memahami REDD+ untuk bisa terus maju. Para pemangku kepentingan di Madre de Dios mampu terlibat secara efektif dalam perencanaan dan pembuatan keputusan ketika mereka memahami dengan baik aspek-aspek REDD+ dan kesehatan hutan. Menciptakan sumber-sumber pengembangan kapasitas seperti program sertifikasi MRV/REDD+, dan memastikan akses terhadap sumber-sumber itu adalah kunci keberhasilan proyek dan penting bagi kemampuan komunitas dalam bertindak.
- Populasi penduduk setempat yang berpengetahuan cukup bisa membentuk ketangguhan sebuah daerah dan upaya-upaya REDD+. Kegaduhan politik dan tingkat pergantian personel yang tinggi di pemerintah daerah menghambat pelaksanaan REDD+ di Madre de Dios. Memperkuat kapasitas untuk menciptakan masa kritis dari profesional dan teknisi yang terlatih yang hidup dan bekerja di tempat dan

menjadikan pengembangan kapasitas sebagai proses terus-menerus dapat menjadi meredakan kegaduhan itu dan mempertahankan pengetahuan yang ada di daerah itu.

- Keterlibatan pemerintah lokal dalam diskusi REDD+ itu penting, karena mereka dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pemangku kepentingan setempat. Keterlibatan mereka dapat meningkatkan koherensi pada berbagai tingkat pemerintahan dan memudahkan koordinasi antara mereka, karena pelaksanaan REDD+ juga bergantung kepada pemangku kepentingan setempat yang jauh dari pembuatan keputusan di level kota dan nasional.
- Untuk sukses, REDD+ harus dibangun secara kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan dan tidak cuma mereka yang paling rentan. Upaya-upaya awal di Madre de Dios mengutamakan bekerja dengan kelompok-kelompok rentan (seperti komunitas-komunitas adat), dan dalam jangka panjang hal itu akan menyebabkan kurangnya keterlibatan sektor-sektor lain, termasuk pertambangan dan pertanian. Untuk membangun proses partisipatif REDD+, mengidentifikasi peran,

strategi dan cara-cara untuk merangsang keterlibatan yang lebih luas sangat penting untuk dilakukan sejak awal. Mendorong dialog-dialog mengenai perbedaan sudut pandang dan menetapkan tujuan dan harapan dapat menumbuhkan saling pengertian yang lebih baik di antara kelompok-kelompok yang terlibat dan kepemilikan mereka terhadap keberhasilan REDD+.

- Keterlibatan lintas budaya memberi nilai, legitimasi dan keberlanjutan dari pendekatan tradisional REDD+. Bekerjasama erat dengan komunitas-komunitas adat di Madre de Dios untuk menjawab kekhawatiran mengenai REDD+ dan untuk mendukung penyusunan proposal *Amazonian Indigenous REDD+* memperkaya upaya-upaya WWF dengan pengetahuan dan nilai-nilai budaya tradisional. Pendekatan yang lebih holistik ini dapat meningkatkan dialog dan aliansi dengan donor dan, jika diperluas, menjadikan REDD+ yang lebih berkelanjutan pada tingkatan politik, budaya, sosial dan lingkungan hidup.

**“BERDASAR PENGALAMAN KITA, SANGAT JELAS BAHWA IMPLEMENTASI MEKANISME REDD+ DI DAERAH INI SANGAT ERAT BERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, DAN KARENANYA PENTING BAGI KITA UNTUK MEMILIKI INFORMASI YANG RELEVAN UNTUK DINEGOSIASIKAN DENGAN BAIK. KERJASAMA DAN PELATIHAN-PELATIHAN YANG TELAH KAMI LAKSANAKAN BERSAMA WWF TELAH MEMBANTU KITA MENDAPATKAN INFORMASI YANG Mendukung Pelaksanaan REDD+.”**

OLIVER LIAO, GIS SPECIALIST, DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, PEMERINTAH DAERAH MADRE DE DIOS (GOREMAD)

# LANGKAH LANJUTAN REDD+ DI PERU



Dibekali dengan berbagai kapasitas dan keterlibatan komunitas dalam proses REDD+ yang benar-benar partisipatif, daerah Madre de Dios dan Peru sebagai keseluruhan tengah bergerak menuju masa depan dan mengambil berbagai langkah untuk membangun kesiapan nasional, yang mencakup:

**MEMBENTUK** Otorita Lingkungan Hidup Daerah (*Regional Environmental Authority*) untuk memadukan inisiatif REDD+ di tingkat daerah yang menjadi bagian strategi nasional, dan memastikan strategi itu dapat dilaksanakan, diterima dan didanai secara penuh, bergerak maju.

**MEMPERLUAS** upaya-upaya pengembangan kapasitas untuk membentuk massa kritis dari anggota berbagai komunitas yang terlatih untuk melaksanakan REDD+ dan MRV

**MERANCANG** sebuah Rencana Pembangunan Ramah Lingkungan (*Green Development Plan*) untuk Madre de Dios guna melindungi sumber daya alam dan kehidupan lokal

**MELENGKAPI** berbagai tingkat acuan kinerja untuk Madre de Dios dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah nasional dan daerah sebagai sumbangan terhadap pembentukan sistem pembayaran untuk kinerja (*payment-for-performance*) yang efektif.

**MENETAPKAN** sistem pemanauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) daerah pada kantor pemerintah yang tertentu dan memastikan berbagai tingkatan untuk MRV dikirim ke *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) oleh pemerintah pusat dan daerah

**MENERBITKAN** daftar emisi gas rumah kaca (*Glasshouse gasses*, GHG) dari berbagai sumber berbeda yang dirancang untuk dan menyumbang kepada akuntansi daerah dan program sertifikat MRV/REDD+

**MEMPERDALAM** saling percaya dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan komunitas-komunitas adat untuk mewujudkan *Amazonian Indigenous REDD+*

**MEMUDAHKAN** komunikasi berbagai keberhasilan daerah untuk menumbuhkan pemahaman mengenai dan keterlibatan dalam REDD+, baik secara regional maupun nasional

**MENGATASI** sebab-sebab deforestasi baik yang bersifat industrial maupun non industrial dan mengidentifikasi berbagai alternatifnya

**MEMPERKUAT** Komisi Pengamanan *Madre de Dios Roundtable on Environmental Services and REDD+*

**MANAMBAH** daerah-daerah yang dikelola dengan standar pengelolaan dan produksi yang lebih baik di dataran rendah Amazon

**MEMPERERAT** kaitan antara *lessons learned* dari Madre de Dios dengan kebijakan-kebijakan nasional

**MENEMPATKAN** Madre de Dios sebagai garda pemimpin di antara anggota *Governors' Climate and Forests Task Force*, sebuah kerjasama antara 19 negara bagian dan provinsi di beberapa negara yang bertujuan memajukan program-program yurisdiksi/subnasional untuk mengurangi emisi akibat deforestasi



**“PENDEKATAN KAWASAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH WWF DIANGGAP MERUPAKAN MODEL PALING SESUAI DALAM PELAKSANAAN REDD+ DI PERU OLEH PEMERINTAH DAN KERJA MEREKA SANGAT DIHARGAI OLEH PEMERINTAH DAERAH”.**

INDEPENDENT NICFI EVALUATORS (2012)

LAORAN DARI LAPANGAN

# INDONESIA

HUTAN HUJAN DI KALIMANTAN ADALAH RUMAH BAGI

15,000

SPEKIES TANAMAN  
BUNGA-BUNGAAN



3,000

SPEKIES TANAMAN



211

SPEKIES MAMALIA



420

SPEKIES BURUNG



1,000,000

MASYARAKAT ADAT  
DAYAK PENGHUNI HUTAN



427,500

HEKTAR TUTUPAN HUTAN

\*136,000,000 HEKTAR  
TUTUPAN HUTAN  
INDONESIA



# REDD+ DI INDONESIA

## KALIMANTAN — PULAU TERBESAR KETIGA DI BUMI, DAN TERBAGI MENJADI TIGA WILAYAH NEGARA INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM — MEMILIKI HUTAN HUJAN TROPIS TERTUA DI DUNIA.



■ Menyatakan bahwa komunitas-komunitas adat dapat mengelola hutan mereka sendiri melalui skema *Hutan Desa*, sebuah kesepakatan hutan desa dalam kerangka hukum nasional yang diakui oleh Kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

Untuk berhasil di Indonesia, REDD+ harus bersaing dengan penggunaan lahan yang sangat menguntungkan di kawasan itu, didukung oleh PADATAPA dari komunitas-komunitas yang bergantung kepada hutan, dan memungkinkan mereka untuk mengendalikan, bertanggungjawab dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam mereka. Pada tahun 2010, WWF mulai melaksanakan REDD+ tingkat kabupaten di Kutai Barat, sebuah kabupaten seluas 3,2 juta hektar di sisi barat Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, Kalimantan, untuk mencapai persyaratan berikut ini.

Hutan-hutan itu kaya kehidupan sejak jutaan tahun lalu, namun saat ini menghadapi berbagai tekanan baru dan membahayakan. Indonesia sendiri kehilangan 1.17 juta hektar hutan per tahun karena penebangan membabi buta, pertambangan dan perluasan perkebunan sawit, dan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara papan atas dalam memproduksi gas rumah kaca.

Sejak 2007, Indonesia telah mengambil langkah besar untuk mengurangi emisi dan melindungi hutan dan penduduknya. Langkah-langkah itu mencakup:

- Menandatangani Deklarasi Hati Borneo (*Heart of Borneo Declaration*), sebuah kesepakatan yang digagas oleh WWF yang mengikat Indonesia, Malaysia and Brunei untuk melestarikan 22 juta hektar hutan hujan melalui jaringan kawasan lindung dan hutan-hutan yang dikelola secara berkelanjutan;
- Berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020, sampai 41 persen jika mendapat bantuan internasional;
- Menyusun strategi perubahan iklim dan REDD+ dan membangun kemitraan dengan WWF, PBB dan organisasi-organisasi lain yang bisa mendukung kerja besar itu;



## WILAYAH KERJA UTAMA DI KUTAI BARAT

Di tengah pulau Kalimantan, sepanjang hulu sungai Mahakam yang berkelok-kelok, Kabupaten Kutai Barat yang jarang penduduknya masih menyimpan 2.4 juta hektar hutan tropis yang sangat tua. Sebuah kabupaten yang kaya dengan berbagai jenis tumbuhan dan hewan liar, dan 167,000 penduduk menyebut kawasan hutan tua yang luas ini sebagai rumah.

Namun, proposal pembukaan perkebunan sawir, perkebunan karet skala kecil dan pertambangan batubara mendorong deforestasi di kabupaten itu, mengancam hutan-hutannya. Di hadapan ancaman mengintai itu, upaya-upaya WWF dipusatkan pada beberapa bidang kerja:

**Mengatasi berbagai penyebab deforestasi.** Mengenali semua penyebab itu dan menawarkan alternatif sosial ekonomi.

**Kapasitas teknis.** Mengembangkan berbagai kapasitas dan pengamanan lokal untuk melaksanakan dan melanjutkan REDD+ di Kutai Barat

**Proses-proses partisipatif.** Inklusi dan pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam implementasi REDD+ melalui pemilihan komunitas dan pengelolaan kawasan lindung untuk menumbuhkan PADJATAPA.

### Tata guna lahan dan penghijauan.

Menjadin hak atas tanah dan membentuk mekanisme bagi hasil sehingga masyarakat pengelola hutan terlindung dan mendapatkan kompensasi yang layak

**Tata kelola.** Bekerja dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membangun infrastruktur dan dukungan bagi REDD+

**Pembiayaan.** Memastikan kemampuan proyek untuk terus berjalan dalam jangka panjang



© WWF/SIMON RAWLESS

## PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA DAN KEMITRAAN DI KUTAI BARAT

Kutai Barat merupakan kawasan yang rumit, di mana banyak inisiatif pemerintah, kebutuhan sosial dan ekonomi, dan adat dan tradisi lokal berpengaruh.

Untuk membangun visi REDD+ yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ini, program kerja WWF di Kutai Barat diarahkan untuk menghadirkan seluruh pemangku kepentingan—pejabat dan otoritas pemerintah, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat adat dan lokal—untuk menjaga komunikasi, kerjasama dan kerja partisipatif.

Dalam kerja ini, WWF yang merupakan mitra lama dan pendukung proses REDD+ di Indonesia, telah membawa pengalaman dan perspektif untuk memahami jalinan berbagai kekuatan yang membentuk masa depan kawasan ini dan untuk mempengaruhi strategi nasional REDD+ dengan melalui pengembangan kapasitas dan penyebaran pengetahuan yang sedang diupayakan di Kutai Barat. Sebagai hasil utama dalam proses ini adalah sebuah kesepakatan untuk memulai dengan menyusun Rencana Aksi REDD+ Kutai Barat, yang menjelaskan tugas masing-masing pelaku dalam mengatasi deforestasi di kabupaten itu dan memastikan pembiayaan untuk memberi imbalan bagi pengurangan emisi.

### MITRA LANGSUNG DAN PERAN MEREKA:

#### LEMBAGA AKADEMIS (UNIVERSITAS MULAWARMAN, CSF, ICRAF, UNIVERSITAS KOPENHAGEN, UNIVERSITAS KYOTO)

Pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas implementasi perlindungan keragaman hayati, tingkat emisi acuan, dan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV)

#### KANTOR DAN LEMBAGA DI TINGKAT NASIONAL (KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, SATGAS UKP4/REDD+)

Integrasi program kerja Kutai Barat ke dalam strategi dan pengawasan REDD+ nasional

#### PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Integrasi dan persetujuan rencana tata guna lahan dan resolusi konflik

#### MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL

Penyusunan dan penerapan rencana tata guna lahan di tingkat desa dan pengelolaan hutan; memasukkan perspektif masyarakat adat dan lokal ke dalam perencanaan dan dialog REDD+

#### PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KAYU RESMI (RATAH TIMBER)

Penyusunan pengaman keragaman hayati, sertifikasi dan alih fungsi hutan untuk mengurangi dampak pembukaan hutan

#### WWF

Memberi saran teknis dan pengembangan kapasitas untuk pelaksanaan REDD+

#### MASYARAKAT SIPIL (PRAKARSA BORNEO BIOMA, POKJA REDD KALIMANTAN TIMUR)

Membangun infrastruktur hukum, ekonomi dan teknis untuk REDD+

#### DONOR (NORAD, TFCA, EU)

Mendukung investasi pada aktivitas sektoral yang relevan dan mendukung



© WWF/SIMON RAWLESS

# KERANGKA WAKTU REDD+ DI KUTAI BARAT

## 2007

- Indonesia, Malaysia dan Brunei menandatangani Deklarasi Hati Borneo yang dirintis oleh WWF
- Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim (*National Action Plan to Address Climate Change*), melibatkan Pemerintah Pusat dalam REDD+

## 2008

- Kementerian Kehutanan dan Perkebunan menyatakan bahwa masyarakat adat boleh mengelola hutan mereka melalui skema *Hutan Desa*, sebuah kesepakatan hutan desa dalam kerangka hukum nasional
- Nota Kesepahaman antara WWF-Indonesia dan Kabupaten Kutai Barat untuk melaksanakan pelestarian dan pembangunan berkelanjutan di Kutai Barat

## 2010

- Indonesia menetapkan moratorium konsesi pembukaan hutan selama dua tahun

## 2011

- Sesi perencanaan dan lokakarya awal di Kutai Barat
- Penetapan program kerja WWF di Kutai Barat
- Meningkatkan kepedulian otoritas pemerintah daerah, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat terhadap REDD+ dan *Hutan Desa*
- Hutan Desa disetujui oleh otoritas Kutai Barat; lebih dari 100,000 hektar hutan desa baru dan perkebunan masyarakat diusulkan kepada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
- 52,000 hektar, terbagi di 20 desa di sembilan kecamatan, disetujui sebagai Hutan Desa
- Akuntansi karbon dan penhunan data dasar dimulai melalui kerjasama dengan Universitas Mulawarman
- Metodologi pemantauan dan pengukuran karbon oleh komunitas ditentukan melalui kemitraan dengan CARF, CIFOR dan Universitas Kopenhagen di bawah proyek IREDD
- Analisis dan inventarisasi data mengenai skenario saat in dan masa depan menuju zero net deforestation (ZND) untuk Kutai Barat selesai dikerjakan

- Pewilayahan komunitas secara partisipatif dimulai melalui lokakarya dan pertemuan-pertemuan, termasuk lokakarya satu hari tentang PADIATAPA dan akuntansi karbon di Desa Linggang Melapeh yang dihadiri oleh 75 warga desa
- Penduduk Long Pahangai I dan II terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga microhydro, menetapkan mekanisme pembayaran dan membentuk kelompok warga yang dipilih melalui proses partisipatif untuk menjalankan pembangkit listrik.
- Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian *debt-for-nature swap* yang menghasilkan US\$28.5 juta investasi untuk melindungi hutan-hutan Kalimantan, dengan Kutai Barat sebagai salah satu daerah prioritas



© WWF/SIMON RAWLESS

## 2012

- Strategi nasional REDD+ diluncurkan oleh Satgas REDD+
- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan WWF-Indonesia setuju untuk merumuskan rencana program pengurangan emisi akibat deforestasi, degradasi dan lahan gambut –Rencana Aksi REDD+
- Mitra-mitra WWF dengan Universitas Kyoto dan PT Ratah Timber untuk memulai riset perlindungan keragaman hayati
- Kajian ekoturisme dilakukan di tujuh kecamatan di Kutai Barat menghasilkan lokakarya multipihak di tingkat distrik mengenai pembangunan ekoturisme
- Perencanaan tata guna lahan tingkat desa di Desa Batu Majang dan Penarung, menghasilkan peta tiga dimensi dari sistem tataguna lahan tradisional dan adat.
- Pengembangan kapasitas untuk masyarakat adat dan lokal memberdayakan desa Long Pahangai, Linggang Melapeh, Long Tuyo' dan Long Isun untuk mendapatkan pengakuan legal bagi aktivitas pelestarian dan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui Peraturan Desa (Perdes); enam draft Perdes disetujui dan diterapkan
- Panilaian PADIATAPA di Desa Linggang Melapeh, Batu Majang dan Long Pahangai memperdalam pemahaman mengenai PADIATAPA dan dilanjutkan dengan beberapa lokakarya PADIATAPA



© WWF/SIMON RAWLESS

## 2013

- Inisiatif Ekonomi Hijau Kutai Barat Green dijadikan percontohan pendekatan yurisdiksi/ subnasional REDD+ oleh Satgas Nasional REDD+
- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengakui 40 hektar wilayah konservasi komunitas di desa adat Linggang Melapeh
- 450,000 hektar yang dilepaskan dari wilayah konsesi perusahaan kayu Sumalindo Unit II untuk komunitas konservasi Batu Majang tidak direncanakan oleh anggota komunitas melalui skema *Hutan Desa*
- Pengaman keragaman hayati berhasil disusun dan menjalani pengujian rintisan di wilayah konsesi PT Ratah Timber
- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meminta ditinjau kelayakannya untuk mendapatkan investasi Dana Karbon melalui ER-PIN tingkat kabupaten



© WWF/SIMON RAWLESS

## KOMUNITAS ADAT DAN LOKAL



© WWF/IMON RAWLES

Masyarakat Dayat di Kutai Barat mewakili beberapa kelompok etnis yang memiliki berbagai macam bahasa, tetapi mereka memiliki sejarah yang sama mengenai penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Program kerja WWF di Kutai Barat telah berupaya mendapatkan pengakuan terhadap pengetahuan tradisional ini dan sistem tataguna lahan adat dan hak-hak penduduknya. Program itu juga telah berupaya membangun kemampuan-kemampuan baru –termasuk kemampuan

teknis, pengetahuan mengenai masalah dan kebijakan hukum yang mempengaruhi tata guna lahan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan PADIATAPA –untuk meningkatkan keterlibatan dan pengaruh komunitas lokal dan adat dalam pelaksanaan REDD+

Di Kutai Barat, kerja WWF berfokus pada pewilayahan partisipatif –sebuah proses inklusif di mana pemangku kepentingan terlibat dalam proses menentukan dan merencanakan penggunaan lahan—dan pembentukan daerah konservasi komunitas dan hutan desa. WWF menggunakan kerangka hukum kehutanan Indonesia untuk mengembangkan dan menjaga dukungan terhadap model kehutanan komunitas, yang dikenal

dengan sebutan *Hutan Rakyat*, di mana kelompok-kelompok warga dapat menetapkan sendiri wilayah konservasi mereka dan merencanakan penggunaan sumber yang ada di dalamnya. Melalui beberapa lokakarya dan pelatihan, WWF telah membantu sejumlah desa di Kutai Barat untuk menyusun rencana dan peta pemanfaatan lahan tiga dimensi mereka, mengenali hutan-hutan komunitas yang potensial, bekerjasama dengan pemegang konsesi hutan untuk mendapatkan pengakuan dan perencanaan wilayah, dan terlibat dalam pemantauan dan pengukuran karbon partisipatif.

Setidaknya ada lima desa yang sudah berhasil mendesak hak-hak mereka untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam setempat, dan 54.000 hektar telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi komunitas. Dan 20.000 hektar lainnya saat ini sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

## PENCAPAIAN DAN DAMPAK

Program kerja WWF di Kutai Barat telah mencapai hal-hal penting berikut ini:

### ■ Pewilayahan skala kecil secara partisipatif dan perencanaan penggunaan lahan oleh komunitas

Para penduduk desa telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali penggunaan lahan yang berlaku dan yang tradisional, melakukan pewilayahan atas tanah mereka untuk kepentingan adat dan manfaat ekonomi, dan menetapkan wilayah perlindungan atau pengelolaan komunitas. Tiga desa, termasuk komunitas di Batu Majang dan Penarung, telah menyusun rencana dan peta pemanfaatan lahan tiga dimensi; setidaknya lima desa –yakni Long Pahangai, Linggang Melapeh, Long Tuyu’ dan Long Isun – telah menyusun peraturan untuk menegaskan dan mendapatkan pengakuan pemerintah terhadap pemanfaatan yang terencana atas tanah sumber daya alam mereka. Melalui upaya itu, dasar yang kuat telah dibangun bagi komunitas itu untuk memajukan pemanfaatan lahan mereka dan tata kelola di tingkat lokal, dan untuk berperan lebih aktif dalam implementasi REDD+ dan pembangunan berkelanjutan.

### ■ Hutan komunitas ditetapkan dan diakui

Model-model pengelolaan hutan oleh komunitas, *Hutan Desa* dan *Hutan Rakyat*, dimana kelompok masyarakat dapat menggunakan dan mengelola hutan mereka dalam kerangka hukum nasional, telah diterima dan mendapatkan pengakuan pemerintah. Hasilnya, banyak komunitas di Kutai

Barat – termasuk mereka yang tinggal di Desa Laham, Long Merah, Long Huray, Lendian Liang Nayuq, Besiq, Noha Silat dan Long Tuyuq, dan Kecamatan Bentian Besar – telah mengajukan permintaan resmi untuk mendapatkan pengakuan atas tanah mereka sebagai *Hutan Desa*. Untuk dicatat, komunitas-komunitas di Kutai Barat telah mengusulkan 69.000 hektar hutan untuk dijadikan hutan desa dan hutan perkebunan komunitas, dan 49.000 hektar telah disetujui dan divalidasi.

### ■ Perusahaan kayu melepaskan sebagian tanah dalam wilayah konsesinya kepada komunitas konservasi

WWF telah berhubungan dengan engaged perusahaan-perusahaan kayu di Kutai Barat untuk mengurangi dampak penebangan kayu pada hutan-hutan di wilayah itu. Melalui sebuah kesepakatan dengan PT Ratah Timber, yang berhasil mendapatkan sertifikat FSC pada tahun 2013, WWF membangun demplot permanen untuk melakukan penghitungan karbon dan panduan untuk pengamanan keragaman hayati yang saat ini sedang dirintis di beberapa wilayah konsesi milik perusahaan. Keterlibatan lain dengan industri berwujud pada pembebasan 450.000 hektar dari lahan konsesi Sumalindo Unit II untuk tujuan konservasi oleh komunitas.

### ■ Perlindungan keragaman hayati dan penggunaan alat-alat yang inovatif

Berbagai sistem pengamanan keragaman hayati berbasis riset yang dikembangkan melalui kerjasama dengan PT Ratah Timber dan Universitas Kyoto memberikan data kuantitatif, tingkat-tingkat acuan

dan metodologi untuk menilai dampak dari kegiatan penebangan kayu dan pengamanan yang memadai untuk digunakan di upaya REDD+ lain di tingkat nasional maupun internasional. Proyek ini juga digunakan sebagai alat uji PRISAI – sistem pengaman REDD+ di tingkat nasional – di Kutai Barat secara kolaboratif dengan WWF dan Satgas Nasional REDD+. Upaya-upaya WWF juga membawa hasil berupa pendekatan-pendekatan yang inovatif dalam menetapkan berbagai tingkat acuan, termasuk pelbagai model yang memungkinkan perbandingan dampak pelbagai keputusan pengelolaan lahan yang berbeda-beda.

### ■ Pengembangan komunitas lokal dan adat

Kegiatan komunitas lokal dan adat dan berbagai pendekatan yang kreatif dalam pengembangan kapasitas – mulai dari pertemuan warga sampai siaran dialog radio dua kali seminggu – menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam REDD+ dan tahu lebih banyak serta berdaya untuk membuat keputusan mengenai proses itu.

### ■ Alternatif sosial ekonomi telah teridentifikasi

WWF tengah membantu penduduk Kutai Barat mengembangkan pilihan dan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan, seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro milik komunitas, inisiatif ekoturisme dan budidaya tanaman yang menguntungkan sekaligus berkelanjutan. Di pemukiman penduduk di Long Pahangai, kerja ini menghasilkan pembangunan pembangkit listrik mikrohidro milik komunitas yang sekaligus mencakup sistem pembayarannya, jaringan

## PENCAPAIAN DAN DAMPAK LANJUTAN

pemeliharaan pembangkit listrik dan struktur pengelolaan yang akan segera disahkan melalui sebuah Perdes. Sejumlah desa tambahan juga disurvei untuk mengetahui kemampuan masing-masing dalam membangun pembangkit listrik mikrohidro. Di komunitas Batu Majang, sebuah pelatihan inokulasi pohon damar telah meningkatkan kemampuan 18 warga dari desa-desa yang berbeda dalam membudidayakan damar untuk mendapatkan resin yang bernilai tinggi. Sebuah kajian ekoturisme yang dilakukan dengan bantuan Pusat Ekoturisme Indonesia memberikan rekomendasi kepada program ekoturisme kabupaten dan lokakarya pembangunan kabupaten yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

### ■ Kemampuan-kemampuan teknis telah diberikan

Pejabat Pemerintah Kabupaten dan anggota komunitas lokal menerima pelatihan teknis lapangan dalam pengukuran dan pemantauan penggunaan lahan, tutupan hutan, simpanan karbon dan tingkat-tingkat acuan, dan kajian yang sedang dilakukan sudah mencapai tahap pengumpulan data aspek-aspek keragaman hayati dan sosial ekonomi dari REDD+.

### ■ Rencana aksi sedang disusun

Pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan telah sepakat untuk menyusun Rencana Aksi REDD+ untuk Kabupaten Kutai Barat.

### ■ Pembiayaan yang meningkat

Dengan keberhasilan program kesiapan REDD+ di Kutai Barat dan tempat-tempat lain, Indonesia telah dipilih untuk menjadi satu dari delapan negara perintis yang akan didukung oleh *Forest Investment Plan* (FIP). Kutai Barat juga telah dipilih untuk dinilai kelayakannya sebelum mendapatkan dana *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF). Selain itu, WWF dan mitra-mitranya telah menegosiasikan pengalihan utang ke konservasi hutan (*debt-for-nature swap*) sebesar US\$28.5 juta antara Amerika Serikat dan Indonesia yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi "hijau" di tiga kabupaten, salah satunya Kutai Barat.

## TANTANGAN

### Upaya kesiapan REDD+ di Kutai Barat telah mencapai keberhasilan yang signifikan, setelah menghadapi berbagai tantangan berikut ini:

- Sistem nasional REDD+ Indonesia sempat tidak menentu karena satu-satunya lembaga REDD+ di tingkat pusat baru akan diumumkan pada September 2013. Penundaan ini menghambat pembiayaan REDD+ nasional dan menghalangi penyelesaian panduan yurisdiksi/subnasional untuk REDD+.
- Laju yang cepat dari perubahan tata guna lahan dan pertumbuhan perkebunan sawit dan kegiatan ekstraktif lainnya di wilayah itu telah menyulitkan upaya REDD+ untuk terus bergerak. Masalah ini akan terus berkembang sampai ada tata kelola, pembiayaan, mekanisme bagi hasil dan insentif untuk sektor swasta yang memadai diberlakukan.
- Konflik dan perubahan politik yang sering terjadi, seperti keputusan memecah Kutai Barat menjadi dua kabupaten pada akhir 2012, seketika menghambat pembuatan kerangka kerja dan kebijakan REDD+, dan mungkin merusak proses pelaksanaannya.
- Kapasitas yang rendah dan lokasi komunitas lokal yang terpencil secara geografis menyebabkan upaya REDD+ berjalan lambat.
- Penggunaan lahan dan pengakuan terhadap hak-hak adat tetap menjadi masalah di Kutai Barat. Perlu waktu panjang untuk mendapatkan ijin dan persetujuan untuk hutan komunitas karena Kementerian Kehutanan dan Perkebunan tidak kunjung melihat pengelolaan hutan komunitas sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keberlanjutan sektor kehutanan.
- Konflik antar masyarakat adat menghambat tumbuhnya pemahaman para pejabat mengenai tenurial dan perlindungan hak-hak adat. Karena masing-masing komunitas adat memiliki pandangan yang berbeda mengenai sistem kepemilikan lahan, perencanaan penggunaan lahan menjadi sulit dibuat dengan hasil yang memuaskan semua pihak. Konflik semacam itu memperlambat proses penentuan dan pengajuan proposal hutan komunitas dan kawasan konservasi.
- Beberapa elemen tertentu dari REDD+, seperti PADIATAPA dan mekanisme pembagian hasil, adalah hal baru di Indonesia maupun sistem hukumnya, dan keraguan terhadap elemen-elemen itu tetap kuat di kalangan pemangku kepentingan. Membagikan pengetahuan mengenai REDD+ untuk membangun pemahaman dan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan dengan berbagai tingkat pemahaman dan latar belakang menjadi sulit dilakukan.
- Dengan begitu banyak pemangku kepentingan, inisiatif-inisiatif konservasi dan kebutuhan yang saling bergesekan semuanya ada di Kutai Barat, sehingga diperlukan dukungan tambahan sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan lebih jelas.



## PELAJARAN DARI LAPANGAN



Sejumlah pelajaran penting yang dipetik dari program REDD+ WWF di Kutai Barat antara lain:

- Melibatkan beragam pemangku kepentingan beda membutuhkan kepercayaan. Memberikan waktu, kesungguhan dan perhatian secara khusus untuk membangun rasa saling percaya sangat memudahkan komunikasi dan penerimaan terhadap gagasan mengenai REDD+ dan pelestarian hutan. Kepercayaan dari pemerintah setempat dan masyarakat desa sangat menentukan keberhasilan kerja WWF di Kutai Barat.
- Kemitraan yang kuat dan kemampuan membaca situasi politik sangat mendukung keterlibatan kita pada setiap tingkat pembicaraan mengenai REDD+. Kemitraan yang baik antara WWF dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana antara WWF dan Pemerintah Indonesia, sangat mendukung kerja WWF dan memberikan kemudahan dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat kabupaten maupun nasional. Kemitraan semacam ini akan makin kuat jika para politikus juga memiliki informasi yang baik dan tepat mengenai REDD+, dan menempatkan setiap proses REDD+ sebagai cara untuk menyelesaikan masalah mereka.
- Alat-alat partisipatif meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pelatihan teknis berbasis kerja lapangan dalam hal penghitungan karbon dan perencanaan penggunaan lahan tidak hanya membekali masyarakat dengan

keterampilan mengukur dan memantau emisi –mempertegas hubungan antara kawasan tinggal masyarakat dan penghidupannya, dan menyediakan forum masyarakat untuk membicarakan hubungan itu. Hal itu memberdayakan dan membekali mereka dengan kemampuan untuk terlibat secara efektif dengan pemerintah dan sektor swasta, yang pada gilirannya mengurangi marjinalisasi dan menghentikan perambahan hutan.

- REDD+ adalah alat mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Di Indonesia, di mana jaringan berbagai jaringan inisiatif konservasi, kepentingan berbagai pihak dan ancaman terhadap hutan terjalin rumit, menetapkan prioritas dan menempatkan REDD+ dalam konteks yang lebih besar sangatlah penting. Di sini dan berbagai tempat lain, sangat penting untuk melihat REDD+ sebagai alat untuk mewujudkan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih besar, yang mensyaratkan integrasi dengan berbagai kegiatan dan pendekatan lain untuk keberhasilannya. Dalam konteks ini, REDD+ sangat mendukung keinginan nasional mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan rendah karbon.



© WWF/SIMON RAWLESS

## LANGKAH LANJUTAN REDD+ DI INDONESIA

Kutai Barat dan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, namun keduanya tetap memiliki komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan dan akan segera bergerak maju dengan seluruh kesiapan untuk REDD+. Langkah-langkah yang direncanakan mencakup;

**MELUNCURKAN** Rencana Aksi REDD+ untuk Kutai Barat dan memadukannya dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), strategi pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, strategi sektor kehutanan dan kebijakan REDD+ nasional, dan menyesuaikan dengan Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi

**MEMBENTUK** sebuah lembaga khusus untuk memimpin pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur bekerjasama dengan lembaga terkait di tingkat nasional.

**MEMASTIKAN** dukungan keuangan untuk pelaksanaan Rencana Aksi REDD+, serta mandat dan dukungan kepada lembaga di tingkat kabupaten untuk melaksanakan rencana aksi tersebut.

**MEMPERKUAT** keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, khususnya komunitas adat dan lokal dan pemangku kepentingan utama lainnya di wilayah REDD+

**MEMPERJELAS** mekanisme pembagian manfaat dan kerangka hukum tata guna lahan, pengakuan terhadap hutan-hutan komunitas dan hak-hak mereka

**MEMPERLUAS** *Hutan Desa dan Hutan Rakyat* agar bisa mencakup lebih banyak lagi hutan-hutan komunitas dan kawasan-kawasan konservasi.

**MEMPROMOSIKAN** pembangunan berkelanjutan, perencanaan tata guna lahan dan peraturan-peraturan yang sesuai melalui perpaduan strategi yurisdiksi/subnasional kawasan REDD+ untuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang baru dibentuk.

**MENGATASI** berbagai penyebab deforestasi melalui penerapan sistem pemantauan pelaksanaan peraturan tata guna lahan, dan dengan pengembangan berbagai alternatif yang mampu memberikan sumber penghidupan secara berkelanjutan.

**MEMBANTU** pelibatan sektor swasta melalui sistem insentif yang sesuai

**MEMBANGUN** hubungan dengan kelompok-kelompok lain yang menggarap isu REDD+ untuk menghindari duplikasi atau persaingan dan menjamin keberhasilan REDD+ di lapangan

**MEMADUKAN** berbagai inisiatif dan mekanisme di tingkat kabupaten dengan strategi dan kebijakan nasional.

LAPORAN DARI LAPANGAN

# REPUBLIK DEMOKRASI KONGO

## KONGO DALAM ANGKA

10,000

SPESIES TANAMAN



1,000

SPESIES BURUNG



400

SPESIES MAMALIA DARAT  
TERMASUK GAJAH,  
SIMPANSE, BONOBO DAN  
GORILA YANG  
TERANCAM PUNAH



94%

PERSEN DARI 71 JUTA  
PENDUDUK KONGO  
TERGANTUNG KEPADA  
HUTAN UNTUK  
KEBUTUHAN ENERGI  
MEREKA

86,000

HEKTAR TUTUPAN  
HUTAN



# REDD+ DI REPUBLIK DEMOKRASI KONGO

REPUBLIK DEMOKRASI KONGO TERLETAK DI AFRIKA TENGAH, WILAYAHNYA TERENTANG LEBIH LUAS DARIPADA GABUNGAN INGGRIS, PERANCIS, JERMAN, SPANYOL, BELGIA, SWISS, ITALI, BELANDA DAN AUSTRIA.



■ Membentuk Komite Nasional REDD+ berisi 14 anggota—tujuh dari pemerintah dan sisanya dari masyarakat sipil – dan juga Komite Lintas Kementerian REDD+ untuk menjamin keterlibatan lintas sektor dalam proses REDD+.

Untuk berhasil di Kongo, upaya-upaya REDD+ harus mengatasi berbagai kebutuhan nasional yang saling bergesekan dan mempertahankan sebesar-besarnya rentang nilai hutan – termasuk produktivitas ekonomi, energi dan pangan—dengan tetap menjaga keragaman hayati dan menurunkan emisi karbon yang merugikan. Itulah tujuan program kerja WWF, dimulai tahun 2010, untuk melaksanakan program REDD+ yang terpadu dan berskala besar di Distrik Mai-Ndombe.

Negara ini adalah satu dari enam negara di sekitar Cekungan Kongo (*Congo Basin*) – sebuah kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas dan kaya keragaman hayati sehingga disebut *Green Heart of Africa* – dan salah satu yang paling parah didera deforestasi. Meskipun Kongo masih memiliki daerah tutupan hutan yang luas, deforestasi terus meningkat akibat kegiatan bercocok tanam dengan cara tebang-bakar dan eksploitasi untuk diambil kayu dan bahan bakar, menyebabkan negara itu termasuk dalam 10 negara di dunia dengan kehilangan tutupan hutan yang paling parah.

Pemerintah Kongo akhirnya berpaling ke REDD+ untuk mengatasi keadaan itu. Sejak 2009, Kongo telah terlibat dengan REDD+ di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan telah mencatat sejumlah capaian penting sebagai berikut;

■ Menjadi negara pertama di sekitar Cekungan Kongo dengan Proposal Persiapan Kesiapan REDD+ (*REDD+ Readiness Preparation Proposal*, R-PP) yang disetujui pada awal tahun 2010;

MEMBANGUN REDD+ UNTUK MASYARAKAT DAN ALAM REPUBLIK DEMOKRASI KONGO



TUJUAN UTAMA PEMERINTAH KONGO ADALAH MENGURANGI KEMISKINAN – MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL DAN MENDISTRIBUSIKAN SUMBERDAYANYA SECARA ADIL. REDD+ ADALAH ALAT YANG BISA MEMBANTU KITA MENCAPAI SEBUAH SASARAN TRANSFORMATIF MELALUI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN SEBUAH NEGARA.

KONGO MENGHADAPI BANYAK TANTANGAN. KITA TIDAK AKAN MAMPU MENGATASINYA SENDIRI. KITA MEMBUTUHKAN HUBUNGAN KEMITRAAN YANG KUAT DAN BERBAGAI PENDEKATAN, METODOLOGI YANG SELARAS DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI STRATEGI KONSERVASI. REDD+ BUKANLAH SEBUAH SKEMA UTANG-PIUTANG, MELAINKAN KEMITRAAN YANG SALING MENGUNTUNGAN.

TOSI MPANU MPANU, FORMER HEAD OF NATIONAL REDD+ COORDINATOR FOR THE DRC MECNT

## WILAYAH KERJA UTAMA DI MAÏ-NDOMBE

Dengan bentang seluas 13 juta hektar, Distrik Maï-Ndombe mencakup daerah savana, hutan rawa gambut, dan hutan semak belukar sepanjang sungai (*gallery forest*) yang menjadi habitat *bonobo* (*Pan paniscus*), sebangsa kera besar endemik. Penduduk kota dan desa-desa di sekitar kawasan itu masih mempraktikkan cara hidup berburu dan meramu; berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan hasil-hasil hutan.

Pergeseran kebutuhan produksi pertanian, kayu api dan arang untuk pasar lokal dan regional mengancam hutan-hutan di Maï-Ndombe, dan berbagai rencana pertanian skala besar serta ekstraksi kayu dan tambang mineral diperkirakan meningkatkan tekanan terhadap kawasan itu. Sebagai respon, dalam bekerja WWF memberi perhatian khusus pada beberapa bidang:

**Komitmen.** Dinyatakan dalam berbagai kesepakatan kebijakan dengan sasaran regional dan nasional yang terukur dan diungkapkan sebagai informasi publik.

**Pewilayahan.** Memusatkan perhatian pada konservasi hutan yang paling terancam dan bekerja dengan mereka yang paling mampu melindungi hutan secara efektif

**Proses partisipatif.** Merangkul dan melibatkan masyarakat pada semua tingkat pengembangan dan pelaksanaan REDD+ di Kongo, termasuk para pemilik hak atas tanah

**Mengatasi berbagai penyebab deforestasi.** Mengenali semua penyebab deforestasi dan memberikan pilihan-pilihan sosial ekonomi

**Kemampuan teknis.** Mengembangkan kemampuan nasional dan lokal yang diperlukan untuk melaksanakan REDD+

**Tata kelola.** Bekerja dengan pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kerangka hukum dan dukungan bagi REDD+

**Pembiayaan.** Memastikan kemampuan proyek untuk terus berjalan dengan fokus berjangka panjang.

## PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA DAN KEMITRAAN DI MAÏ-NDOMBE

Sebuah pendekatan yang terpadu dan inklusif sangatlah penting bagi keberhasilan program WWF di Maï-Ndombe, dan itulah perhatian utama WWF sejak awal.

Ipada tahun 2010, WWF memulai keterlibatannya di Maï-Ndombe dengan mengumpulkan semua pemangku kepentingan dan mitranya untuk membangun visi bersama mengenai kerja REDD+ di daerah itu. Dengan menumbuhkan proses partisipatif yang memadukan berbagai pengetahuan dan perspektif yang berbeda-beda, dari yang *top-down* dan *bottom up*, WWF mampu membangun keterlibatan masyarakat yang efektif dalam REDD+ di Maï-Ndombe.

Sebagaimana diakui oleh pemangku kepentingan dan pendukung REDD+ di Kongo, WWF telah berhasil memberikan saran dan panduan kepada pemangku kepentingan lokal dan nasional mengenai REDD+ di Maï-Ndombe. Namun, WWF tidak dapat memainkan peran penting ini jika tidak memiliki kemitraan yang kuat.

### MITRA LANGSUNG DAN PERAN MEREKA:

#### KANTOR DAN LEMBAGA PEMERINTAH DI TINGKAT NATIONAL (MECNT, CN-REDD)

Hubungan para pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional, pengawasan, dan memadukan program kerja di Maï-Ndombe ke dalam strategi nasional REDD+

#### DANA PERWALIAN MULTIDONOR UNDP

Pengelolaan sementara dana REDD+ nasional

#### UN-REDD

Memberikan saran teknis mengenai rancangan program dan penerapan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV)

#### WWF

Dukungan teknis dalam perancangan program dan penerapan rencana penggunaan lahan di tingkat lokal

#### PEMERINTAH LOKAL DAN KOMITE-KOMITE DESA

Integrasi dan persetujuan terhadap rencana penggunaan lahan dan resolusi konflik

#### OTORITAS ADAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT YANG DIAKUI OLEH HUKUM

Pelaksanaan rencana-rencana penggunaan lahan di tingkat desa dan adopsi berbagai alternatif strategi penghidupan (*livelihoods*)

#### PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTANIAN DAN PERKAYUAN YANG SAH (NOVACEL, SOGENAC, SODEFOR)

Pelaksanaan berbagai pilihan pertanian dan agroforestri, pengendalian kebakaran

semak belukar, sertifikasi dan pengalihan fungsi hutan untuk mengurangi dampak penebangan kayu.

#### MASYARAKAT SIPIL (GTCR, RRN, CEDEN, ISCO CONGO, HANNS SEIDEL, GEREJA, DAN NGO DI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL)

Informasi, pendidikan dan komunikasi; pengawasan dan bantuan untuk berbagai aktivitas pendukung

#### DONOR (FIP, KFW, CBFF, USAID-CARPE, NORAD, AFD)

Sudah mendukung investasi di kegiatan sektoral yang relevan dan mendukung

#### MASYARAKAT ADAT DAN KMUNITAS LOKAL

Menghadirkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam dialog perencanaan REDD+



# KERANGKA WAKTU REDD+ DI MAÏ-NDOMBE

## 2009

- Pemerintah Kongo secara resmi melibatkan diri dalam REDD+

## 2010

- Lokakarya pembuka dan validasi pemangku kepentingan di Maï-Ndombe
- Pemerintah Kongo mempresentasikan pendekatan terpadu untuk Maï-Ndombe di Konferensi Negara-negara Anggota UNFCCC di Cancun
- WWF memulai program kerja di Maï-Ndombe
- Sosialisasi di pemerintah provinsi mengenai REDD+ dan perubahan iklim
- Dokumen mengenai program terpadu REDD+ di tingkat distrik Maï-Ndombe dipresentasikan COP 16 di Cancun, Mexico

## 2011

- Pewilayahan mikro untuk 15 komunitas perintis di Bolobo Territory berhasil diselesaikan— lebih dari 750 laki-laki dan perempuan terlibat dalam proses itu
- Kajian-kajian di tingkat subnasional tentang sebab-sebab pendorong deforestasi disiapkan oleh University of Louvain; studi kelayakan hutan komunitas
- Memulai Penilaian Kehutanan Nasional (*National Forestry Assessment*)
- Konsultasi publik mengenai REDD+ di REDD+ Summer University
- Panduan Nasional Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (FPIC) selesai dan disetujui oleh CN-REDD
- Pengakuan resmi untuk Maï-Ndombe sebagai lokasi perintis Forest Investment Program (FIP).
- Struktur keuangan dan organisasi REDD+ di tingkat subnasional selesai disusun
- Inventarisasi data untuk zero net deforestation (ZND) dilakukan; analisis skenario kondisi saat itu dan masa depan ZND selesai disusun
- Pewilayahan komunitas partisipatif disetujui sebagai aktivitas utama persiapan REDD+ di Kongo
- Inisiatif Maï-Ndombe dipresentasikan dalam acara tambahan DRC/ USAID-CARPE selama pertemuan UNFCCC Durban

## 2012

- 22 wakil komunitas dilatih mengoperasikan komputer untuk mengumpulkan dan menyimpan data untuk MRV
- Presentasi draft makalah program pengurangan emisi di Kongo (*DRC's Emissions Reductions Programme Idea Note, ER-PIN*) di Santa Marta, Colombia
- Lebih dari 1,000 masyarakat adat dan komunitas lokal dari 5 daerah mendapatkan sosialisasi mengenai perubahan iklim oleh organisasi masyarakat sipil nasional yang terlatih
- Metodologi pengukuran, pelaporan dan verifikasi disusun dan disebarluaskan di Maï-Ndombe; taksiran simpanan karbon disusun
- Kerangka Kerja Rencana Pengelolaan Masyarakat (*Community Management Planning Framework*) untuk membantu masyarakat mengembangkan rencana untuk mencapai ZND selesai disusun dan diuji di lapangan di komunitas Mpelu
- Lokakarya regional REDD+ untuk Cekungan Kongo dilaksanakan dengan Maï-Ndombe sebagai studi kasus
- Naskah akhir ER-PIN yang disusun berdasar keberhasilan program di Maï-Ndombe, mengusulkan untuk menjangkau 300,000 rumah tangga di lokasi seluas 12 juta hektar dan secara berkelanjutan menurunkan laju deforestasi sampai separuhnya
- Versi bahasa Inggris dari Studi Kasus Bersama WWF dan Pemerintah Kongo mengenai Pendekatan Terpadu Persiapan REDD+ di Maï-Ndombe secara resmi dipresentasikan dalam acara tambahan selama UNFCCC COP 18 di Doha oleh Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Turismo Republik Demokrasi Kongo

## 2013

- ER-PIN untuk program REDD+ yang pertama kali dilaksanakan dalam yurisdiksi Afrika dikirim ke FCPF Carbon Fund; investasi dari FIP sebesar US\$15 juta disetujui
- Versi bahasa Spanyol dan Perancis dari studi kasus pendekatan terpadu persiapan REDD+ di Maï-Ndombe diterbitkan



© WWF/JULIE PUDLOWSKI



© WWF/JULIE PUDLOWSKI



© WWF/JULIE PUDLOWSKI



## MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL



© WWF/JULIE PUJLOWSKI

Merangkul kelompok-kelompok masyarakat yang bergantung kepada hutan sangatlah penting untuk upaya konservasi, hal itu juga sangat menentukan keberhasilan program kerja REDD+ WWF di Mai-Ndombe.

WWF memusatkan seluruh strategi REDD+ di Mai-Ndombe pada pewayalahan partisipatif dan pengakuan hak-hak adat, sehingga masyarakat adat dan komunitas lokal dapat memainkan peran yang sangat besar, khususnya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti

pelestarian hutan, penanaman kembali hutan-hutan yang pernah dibuka dan mencegah kebakaran savana karena ulah manusia.

Dengan menggunakan pewayalahan partisipatif, WWF bekerjasama dengan 750 anggota masyarakat Bateke Nord Chefferie di Bolobo Territory, Distrik Mai-Ndombe untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak pengaruh mereka, khususnya kelompok-kelompok yang selama ini tersisih, pada kebijakan tata guna lahan. Di kelompok masyarakat lain di distrik itu, misalnya penduduk Desa Nkala, pewayalahan partisipatif mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dengan membangun pemahaman bersama

mengenai pembagian wilayah dan peruntukannya. WWF juga memberikan pelatihan mengenai pamantauan berbasis masyarakat dan pengukuran simpanan karbon, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kemampuan dan penghidupan, dan mendorong mereka lebih terlibat dalam proses REDD+.

Melalui pembekalan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal dengan pemahaman baru dan alat-alat untuk kerjasama, kemampuan teknis tingkat tinggi dan informasi kebijakan, masalah-masalah hukum dan perikatan yang mungkin mempengaruhi penggunaan lahan dan hak-hak mereka, WWF telah mendukung proses pembuatan kebijakan yang transparan dan keterlibatan yang aktif dan berpengetahuan dari masyarakat yang paling berhak mendapatkan manfaat dari REDD+.

**“(PEMETAAN PEMANFAATAN LAHAN) TELAH MEMBANTU MEREDAM KONFLIK ANTAR DESA, DAN SEKARANG SEMUA ORANG TAHU DAN SEPAKAT MENGENAI BATAS-BATAS TANAH MEREKA DAN UNTUK APA TANAH ITU DIGUNAKAN. SEKARANG KAMI MENIKMATI HUBUNGAN YANG DAMAI DENGAN TETANGGA DESA. ITU MEMBANTU KAMI MENGETAHU LETAK HUTAN YANG SAKRAL. BAGI KAMI, INI ADALAH KEMAJUAN BESAR; KARENA SEBELUM INI KAMI SEMBARANGAN SAJA MEMBUKA HUTAN DI MANA-MANA. SAYA AKAN BILANG KEPADA ANAK-CUCU SAYA BAHWA TANPA HUTAN, KITA TIDAK AKAN BISA HIDUP.”**

CHIEF MAMBE NGONO, NKALA VILLAGE

## CAPAIAN DAN DAMPAK

Capaian penting yang telah kami raih melalui program kerja WWF di Mai-Ndombe antara lain sebagai berikut:

- **Terbangunnya proses yang partisipatif dan terpadu**  
Lokakarya di awal proyek berhasil mewujudkan validasi proyek itu secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional. Lokakarya ini juga berhasil mempertemukan para pemangku kepentingan lokal di Malebo, untuk kali yang pertama.
- **Untuk kali pertama, pendekatan yurisdiksi/subnasional REDD+ diluncurkan di Afrika**  
Para pemangku kepentingan sepakat untuk bekerja di tingkat yurisdiksi/subnasional dengan pendekatan yang memadukan sejumlah metodologi pengurangan emisi (kemudian disebut “Pendekatan Terpadu”). Untuk Afrika, ini adalah percobaan pertama REDD+ di tingkat Yurisdiksi/subnasional.
- **Keterampilan teknis MRV telah diberikan**  
Para ahli di tingkat nasional dan anggota-anggota masyarakat lokal telah menerima pelatihan teknis berdasar pengalaman lapangan untuk mengukur dan memantau penggunaan lahan dan tutupan hutan. Selain itu, kajian-kajian yang baru disusun memberikan alat-alat teknis yang diperlukan masyarakat Mai-Ndombe untuk membuat keputusan berdasar informasi yang memadai, mengenai sumber daya alam mereka, pengelolaan hutan masyarakat, dan struktur keuangan dan organisasi dari Bolobo Territory.
- **Pemulihan infrastruktur sosial ekonomi dasar sedang berjalan**  
Setelah ditelusuri, berbagai pilihan sumber pendapatan desa-desa setempat, seperti pabrik pengolahan ubi kayu dan penangkapan ikan berkelanjutan, telah mengurangi dampak buruk pada hutan akibat deforestasi yang dipicu oleh perdagangan kayu lokal.
- **Pemulihan infrastruktur sosial ekonomi dasar sedang berjalan**  
Setelah ditelusuri, berbagai pilihan sumber pendapatan desa-desa setempat, seperti pabrik pengolahan ubi kayu dan penangkapan ikan berkelanjutan, telah mengurangi dampak buruk pada hutan akibat deforestasi yang dipicu oleh perdagangan kayu lokal.
- **Pemulihan infrastruktur sosial ekonomi dasar sedang berjalan**  
Setelah ditelusuri, berbagai pilihan sumber pendapatan desa-desa setempat, seperti pabrik pengolahan ubi kayu dan penangkapan ikan berkelanjutan, telah mengurangi dampak buruk pada hutan akibat deforestasi yang dipicu oleh perdagangan kayu lokal.
- **Pemulihan infrastruktur sosial ekonomi dasar sedang berjalan**  
Setelah ditelusuri, berbagai pilihan sumber pendapatan desa-desa setempat, seperti pabrik pengolahan ubi kayu dan penangkapan ikan berkelanjutan, telah mengurangi dampak buruk pada hutan akibat deforestasi yang dipicu oleh perdagangan kayu lokal.
- **Komite-komite lokal telah terbentuk**  
Komite-komite itu telah membantu masyarakat mengelola sumber daya alam dan tanah, dan mengembangkan kapasitas terkait REDD+ dan perubahan iklim.
- **Penyebab-penyebab deforestasi telah dikenali**  
Kajian-kajian teknis yang penting telah menemukan berbagai penyebab langsung yang mendasari deforestasi.
- **PADIATAPA**  
Panduan PADIATAPA telah disusun secara partisipatif, divalidasi oleh Komite Nasional REDD+ Kongo dan saat ini sedang digunakan oleh kelompok-kelompok NGO dan sektor swasta nasional di lima provinsi.
- **Meluncurkan National Forestry Assessment**  
Proses penilaian kehutanan ini membantu mengenali para penyangkong dan pemangku kepentingan utama.
- **Sistem pelaporan deforestasi dan Register REDD+**  
Kongo telah membentuk register REDD+ nasional dan tengah menjajagi kemungkinan penggunaan SMS agar masyarakat dapat terlibat dalam pelaporan dan verifikasi deforestasi – yang pertama di dunia.
- **Pengetahuan yang tersebar secara internasional**  
Kerja REDD+ Kongo telah dipresentasikan di tiga pertemuan COP secara berturut-turut –Cancun, Durban dan Doha—sementara Studi Kasus REDD+ Kongo telah diperkenalkan di COP18 oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan saat ini telah tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol.

## TANTANGAN

Meskipun telah memberi hasil-hasil penting, program kerja REDD+ WWF di Kongo juga menghadapi tantangan-tantangan berikut ini:

- REDD+ adalah hal baru di Kongo, dan melibatkan pemangku kepentingan pada berbagai tingkatan proses pembuatan keputusan telah menjadi penting, namun proses pembuatan keputusan menjadi lebih lama dibanding waktu yang mungkin sudah direncanakan.
- Banyak lokasi yang sulit dijangkau sehingga perjalanan menjadi lama dan mahal.
- Ada waktu yang sangat berharga terbuang ketika ada pemilihan umum tahun 2011 yang diikuti kerusuhan warga.
- Pergantian staf di Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Turisme menyebabkan proses REDD+ berjalan lambat.
- Kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan antara Pemerintah Kongo dan iming-iming keuntungan besar sektor ekstraktif –misalnya adalah penebangan liar yang terus berlangsung dengan keterlibatan sejumlah otoritas tradisional di daerah—tetap menjadi masalah. Akibatnya, persiapan REDD+ menjadi sulit.
- Beberapa lembaga pemerintah memiliki kemampuan yang rendah untuk menjalankan proses REDD+.
- Ada kebutuhan untuk memastikan prinsip PADIATAPA benar-benar difahami dan diterapkan dengan

baik oleh pemerintah dan tidak dianggap sekadar mencontong di daftar kegiatan yang dilaksanakan ala kadarnya.

■ Ada kebutuhan proyek tambahan di lapangan untuk memudahkan pertukaran informasi antar dengan masyarakat.

■ Pemerintah Kongo tidak memiliki teknologi citra satelit dan orang-orang yang terlatih untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan teknis, misalnya menentukan tingkat-tingkat acuan deforestasi.

Seekor bonobo yang berhasil diselamatkan di Pusat Perlindungan Bonobo, Republik Demokrasi Kongo. Informasi lebih lanjut ada di [www.friendsofbonobos.org](http://www.friendsofbonobos.org)

**“REDD+ MEMBERDAYAKAN KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN SEPERTI PARA USIA LANJUT, ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN. SEBELUM KOMITE KONSULTASI DIBENTUK DI MAI-NDOMBE UNTUK MEMBICARAKAN MASALAH-MASALAH SEPUTAR REDD+, KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN ITU TIDAK PUNYA SUARA DALAM MASALAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN TANAH KOMUNITAS.”**

FLORY BOTAMBA ESOMBO, WWF-DRC REDD+ PROJECT MANAGER AND FOCAL POINT



## PELAJARAN DARI LAPANGAN



Dari keberhasilan dan tantangan program WWF di Mai-Ndombe dapat dipetik sejumlah pelajaran penting, yang mencakup:

- **Sosialisasi untuk masyarakat lokal sebelum mereka diminta untuk bertindak.** Bersama otorita nasional REDD+ memnggarap strategi komunikasi berkait masyarakat adat dan lokal sebelum bekerja dilapangan telah membantu memperjelas pemahaman mengenai visi semua pihak dan mempromosikan PADIATAPA. Akan tetapi, PADIATAPA bukan sekadar alat pengumpul informaso, khususnya pada awal program. Itu adalah juga alat untuk menumbuhkan kedekatan, rasa saling percaya, serta penerimaan masyarakat, yang sangat penting bagi tindakan bersama yang partisipatif.
- **Pemetaan pemanfaatan lahan secara partisipatif adalah langkah pertama untuk memastikan masyarakat penguasa lahan menghentikan deforestasi.** Peta-peta itu memberdayakan masyarakat dalam masalah penguasaan lahan, dan identifikasi hak-hak atas tanah melalui persetujuan batas-batas tanah oleh seluruh komunitas. Hal ini dapat mengurangi konflik antara masyarakat dan pengelola lahan yang difasilitasi.
- **Perluasan kegiatan dan kaitan antara kebutuhan lokal dengan kebutuhan nasional dan internasional sangatlah penting bagi keberhasilan REDD+.** Pelaksanaan awal program harus diletakkan pada tingkatan yang pas. Di Kongo, WWF dan CN-REDD yang semula mencoba terlibat di tingkat nasional dan

internasional, kemudian menyadari bahwa bekerja di tingkat lokal/masyarakat dan kemudian melebarkan cakupannya akan lebih efektif. Membangun kemitraan yang baik sejak awal dan mendorong integrasi pemangku kepentingan dari berbaai sektor adalah langkah-langkah awal yang sangat menentukan.

- **Ketika bekerja di tingkat masyarakat, memiliki hubungan yang dekat dengan warga dan otoritas setempat sangatlah penting.** Seluruh pemangku kepentingan adalah penting untuk memajukan proses REDD+ di masyarakat, tetapi mereka harus didekati secara tepat. Memahami budaya lokal dan menghormati pola dan bentuk-bentuk komunikasi yang ada sangatlah penting.
- **Pemangku kepentingan yang menjadi sasaran program perlu diberdayakan agar mereka mampu memimpin proses REDD+.** Hal ini dapat membangun rasa memiliki di kalangan pemangku kepentingan. Di Mai-Ndombe, hal itu melibatkan pelatihan perubahan iklim dan prinsip-prinsip REDD+. Para peserta kemudian melatih kelompok-kelompok lokal dan otoritas setempat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat dan lokal. Kepemilikan program oleh para pemangku kepentingan akan membantu mendapatkan visi bersama dan tujuan-tujuan pros- esnya. Pada akhirnya, itu akan bermuara pada keberhasilan yang menjadi milik bersama.



© WWF/JULIE PUDLOWSKI



**“KITA PERLU MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI PUSAT DARI SEMUA PROSES REDD+ DI KONGO. PENYEBAB-PENYEBAB POKOK DEFORESTASI TERKAIT DENGAN KOMUNITAS KARENA KETERGANTNGAN MEREKA TERHADAP SUMBER DAYA HUTAN UNTUK KEHIDUPAN MEREKA SEHARI-HARI. PROYEK INI MENGAKUI HAK-HAK MASYARAKAT DAN MEMBERI MEREKA KESEMPATAN UNTUK TERLIBAT DAN MENGELOLA SUMBER DAYA MEREKA SENDIRI.”**

BRUNO PERODEAU, WWF-DRC CONSERVATION DIRECTOR

## LANGKAH LANJUTAN REDD+ DI KONGO

Dengan kapasitas kesiapan REDD+ yang sudah ada, Kongo saat ini tengah menyiapkan beberapa rencana untuk mulai menginjak fase investasi dari strategi REDD+ negara itu, sebelum sebuah mekanisme resmi REDD+ diumumkan tahun 2020. Langkah-langkah lanjutannya mencakup:

**MENGEMBANGKAN** sebuah program pengurangan emisi yang komprehensif;

**MENEGOSIASIKAN** Kesepakatan Pengadaan untuk Pengurangan Emisi (*Emission Reduction Purchase Agreement, ERPA*) dan juga memastikan adanya mekanisme pendanaan di tingkat subnasional;

**MEMASTIKAN** penyesuaian dengan sektor lain dan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara pendekatan proyek dalam konteks besar (*nested*) dan yurisdiksi/subnasional;

**MENYELESAIKAN** pewilayahan lingkup besar (*macrozoning*) dan skala mikro (*microzoning*) di wilayah program;

**MENERAPKAN** program sistem pembayaran untuk manfaat ekosistem (*payment for ecosystem services, PES*) yang mendukung ZND dan sebuah rencana pemanfaatan lahan terpadu;

**MENJELASKAN** insentif pajak/fiskal dan landasan hukum untuk hak pemanfaatan lahan, pengakuran dan hak-hak kolektif, dsb;

**MENYIAPKAN** hutan komunitas dan/ atau kawasan lindung komunitas;

**MENGATASI** pemicu deforestasi baik yang bersifat industrial maupun non industrial;

**MEMFASILITASI** keterlibatan sektor swasta dengan mekanisme dan insentif yang tepat.



**DAMPAK REDD+ DAN  
KECENDERUNGAN LINTAS  
KAWASAN DI INDONESIA,  
PERU DAN  
REPUBLIK DEMOKRASI KONGO**

# **DAMPAK & KECENDERUNGAN**

## DAMPAK PROGRAM KERJA REDD+ WWF



Memahami kemungkinan dan tantangan REDD+ sangatlah penting jika kita harus melindungi lingkungan hidup yang paling kaya di dunia, penghidupan orang-orang yang bergantung kepadanya dan kesehatan planet ini secara keseluruhan.

Kerja WWF di Peru, Indonesia dan Kongo bertujuan untuk menguji berbagai kemungkinan di tiga tempat yang secara hayati paling beragam di dunia. Melalui kerja ini, WWF telah menunjukkan rintisan REDD+ *at scale* yang menganjurkan keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal, yang secara resmi telah diakui oleh pemerintah, tengah mempengaruhi kebijakan nasional REDD+, menunjukkan berbagai jalur menuju ZND dan memberikan keuntungan yang

besar untuk modal pendamping yang ditanam oleh pemerintah tuan rumah, dan donor-donor internasional. Dari tiga kawasan yang berbeda-beda itu, didapat hasil-hasil sebagai berikut:

- Pengakuan di saat pertama untuk hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam dan penyusunan proposal Amazonian Indigenous REDD+;
- Kerjasama di bawah yurisdiksi/subnasional untuk menyiapkan dan mengajukan ER-PIN Kongo, upaya pertama menjalankan REDD+ dalam yurisdiksi dan wilayah subnasional di benua Afrika;
- Pembentukan forum REDD+ di tingkat regional dan nasional yang menghadirkan anggota-anggota masyarakat lokal, kelompok-kelompok adat, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya, dan mendorong mereka untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan dan regional dan nasional;

- Pengembangan sistem perlindungan keragaman hayati secara partisipatif, metodologi MRV dan tingkat-tingkat acuan karbon subnasional;
- Penemuan alat-alat dan strategi baru untuk membantu masyarakat bekerja menuju ZND;
- Inisiasi strateg dan rencana aksi REDD+ nasional dan regional yang disusun dengan pelajaran dari kerja lapangan dan pengalaman praktis;
- Dasar mekanisme pembagian manfaat dan pengurangan kemiskinan berdasar pelayahan mikro, perencanaan tata guna lahan secara partisipatif, pengelolaan hutan komunitas dan berbagai kegiatan lain yang memperkuat penguasaan tanah, hak-hak dan penghidupan masyarakat adat dan komunitas lokal;
- Memperkuat penerapan PADIATAPA, pengembangan kapasitas dan peluang-peluang berbagi pengetahuan;
- Dukungan internasional yang makin besar untuk kelanjutan program kerja dan perluasannya.

Semua itu adalah dampak dan hasil-hasil yang penting, dan menunjukkan potensi besar REDD+ untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan alam lingkungannya, jika dipimpin oleh mitra masyarakat yang berpengalaman secara terpadu dan inklusif.

Di tiga kawasan yang berbeda itu, baik budaya, kelembagaan politik dan kondisi lingkungan hidup dan sosialnya, program kerja WWF telah berhasil membangun pijakan untuk bergerak lebih jauh—kemitraan, kemampuan dan sistem yang terbangun untuk membawa perubahan jangka panjang.

## KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN: PENDEKATAN PARTISIPATIF REDD+

Program kerja WWF di Peru, Indonesia dan Kongo dilakukan untuk menjadikan REDD+ bersifat partisipatif – mengembangkan kemampuan dan peluang bagi semua kepentingan untuk dipertimbangkan. Melalui komite masyarakat, lokakarya dan pelatihan, forum nasional dan internasional, dan berbagai kesempatan berdialog antar pemangku kepentingan, kerja WWF telah melibatkan berbagai kalangan, kepentingan dan sudut pandang untuk secara bersama membentuk visi bersama untuk REDD+ di masing-masing wilayah. Pendekatan partisipatif ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Forum-forum yang dibentuk atau dihidupkan kembali, dalam kasus Madre de Dios di Peru, di mana para pemangku kepentingan bisa mendapatkan konsensus dan kesepakatan, dan dengan hasil itu mereka ikut menyusun strategi REDD+ di tingkat regional maupun nasional;
- Membangun kapasitas di masyarakat adat dan lokal, masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kemasyarakatan, dan NGO setempat untuk memainkan peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan REDD+, dengan tujuan untuk “melatih para pelatih” –menimbulkan efek domino sehingga para pemangku kepentingan yang baru mendapatkan informasi dapat membagi pengetahuan mereka dengan komunitas masing-masing;
- Mendorong ke arah pengakuan dan dukungan lembaga pemerintah di tingkat lokal, regional dan atau nasional kepada kelompok dan pemangku kepentingan yang sebelumnya tersisih;
- Memberdayakan anggota komunitas untuk bekerja satu sama lain, dengan pemerintah daerah dan pusat, dan dengan sektor swasta dengan cara yang baru dan efektif.

### PELAJARAN DARI LAPANGAN

Ketika proses partisipatif diterapkan di tiga kawasan itu, program kerja ini memberikan sejumlah pelajaran yang dapat dipetik sebagai berikut:

- Keterlibatan yang efektif diawali dengan mengenali para pemimpin masyarakat yang menciptakan proses dinamis dan membuka ruang dialog di masyarakat. Para pemimpin harus memiliki kepercayaan diri, diakui dan dihormati, dan diakui oleh masyarakatnya. Mereka juga harus mampu berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan bahasa Barat They should also be able to speak in their own language and a Western language and mampu membuka ruang bagi kelompok-kelompok rentan untuk terlibat. Pemimpin yang optimal tidak selalu dipilih secara resmi sebagai wakil masyarakat, yang lebih politis dan memegang peran sebagai mediator.
- Mengakui adanya berbagai tingkatan partisipasi (lokal, regional, dsb.) dengan kepentingan dan tujuan yang beragam sangatlah penting. Perlu diciptakan ruang yang tepat dan khas untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan untuk menyiapkan setiap tingkatan itu agar dapat mencapai tujuan secara efektif –yang membutuhkan waktu dan sumber daya.
- Merumuskan tujuan partisipasi dengan jelas dan menghubungkan para partisipan dengan sumber daya sangat menentukan keberhasilan setiap proses. Demi keberhasilan proses partisipatif, perlu ditentukan kerangka waktu, tanggung jawab, sumber daya dan hasil nyata yang diharapkan dari proses tersebut. Dengan awalan berupa pemahaman yang jelas mengenai peran dan harapan, proses partisipatif akan berjalan lebih mulus dan produktif.

- Dalam sebuah proses partisipatif, para pemangku kepentingan perlu menentukan pandangan mereka dengan jelas sekaigus secara lentur menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelompok. Kelompok masyarakat adat, NGO, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses partisipatif ini, perlu tahu dengan baik apa yang mereka inginkan dan pada saat yang sama bersikap lentur dan mau berubah jika diperlukan pada waktunya. Setiap proses punya kesulitannya sendiri, tetapi sangat penting menemukan alternatif untuk menyelesaikan masalah itu atau memilih penyelesaian lain jika cara itu menguntungkan dan prosesnya memungkinkan.
- Proses yang inklusif dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan konsensus para pemangku kepentingan dalam proses partisipatif. Memastikan sejak awal sebuah proses inklusif dan transparan perlu dilakukan untuk membangun rasa saling percaya di kalangan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pijakan antara untuk mengembangkan mekanisme REDD+ yang menguntungkan masyarakat, kawasan dan negara secara keseluruhan.

Proses-proses partisipatif –dan pengembangan kapasitas yang diperlukan—memberdayakan individu dan masyarakat melalui penambahan pengetahuan mengenai kekuatan-kekuatan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang mempengaruhi hidup dan kawasan mereka, kemudian memberi mereka alat-alat untuk menemukan pilihan-pilihan yang adil dan berkelanjutan. Berbagai kerja WWF menggambarkan bahwa partisipasi bukanlah peristiwa sekali waktu yang berdiri sendiri, melainkan proses terus-menerus yang berjalan sebelum, selama dan setelah pelaksanaan REDD+ – sebuah pendekatan yang tanggap terhadap dan menjadi bagian dari cara hidup masyarakat, dengan konsekuensi positif yang besar.

## KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN; PEMETAAN DAN PEWILAYAHAN MIKRO BERBASIS MASYARAKAT

Di tiga kawasan yang menjadi wilayah program WWF itu, pewilayahan mikro secara partisipatif dan pemetaan sudah terbukti menjadi alat yang efektif dan memberdayakan dalam menciptakan penerimaan di kalangan masyarakat yang bergantung kepada hutan. Proses berkumpul untuk merumuskan pemanfaatan lahan secara adat dan sasaran pengelolaan sumber daya alam akan memudahkan dialog antar pemangku kepentingan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan, kemitraan dan kemungkinan-kemungkinan baru yang mencakup:

- Mengembangkan sistem penguasaan lahan dan tata kelola pemerintahan lokal, khususnya di Kongo, di mana 15 masyarakat telah memiliki peta dan pewilayahan partisipatif telah diakui sebagai metodologi utama REDD+;
- Pengembangan alat-alat inovatif untuk mengenali dan mengenali jenis pemanfaatan lahan yang direncanakan maupun yang sudah beralan, seperti peta tiga dimensi, dan peraturan-peraturan desa yang disusun oleh masyarakat di Kutai Barat, Indonesia;
- Memperkuat pengakuan dan kapasitas untuk bekerja dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menentukan wilayah hutan adat Strengthened recognition and capacity to engage with governments and the private sector to designate areas for traditional uses, sustainable development or conservation, as in the case of Indonesia's Hutan Desa and *Hutan Rakyat* community forestry models and emerging agreements with locally operating logging companies.

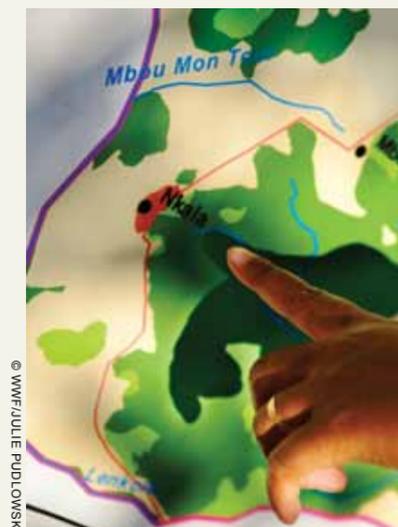
### PELAJARAN DARI LAPANGAN

Dari keberhasilan dan tantangan dari pemetaan dan pewilayahan partisipatif ini dapat dipetik sejumlah pelajaran penting sebagai berikut:

- **Masyarakat perlu memetakan wilayah yang harus dilindungi dari tekanan dari luar.** Pewilayahan mikro dan pemetaan partisipatif memudahkan upaya mendapatkan pengakuan dan dukungan untuk klaim masyarakat terhadap tanah, khususnya jika kegiatan itu terkait atau ada dalam kerangka kerja atau kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat mengukuhkan penguasaan tanah mereka dengan cara itu, mereka dapat berhubungan dengan otoritas pemerintah dan sektor swasta dengan lebih berdaya, efektif dan pengaruh yang lebih kuat.
- **Mengaitkan pemetaan masyarakat dan kejelasan hak penguasaan tanah dapat mengurangi potensi konflik.** Kebiasaan berdialog yang ditumbuhkan dalam dan antar kelompok masyarakat mengenai pemanfaatan lahan secara adat, pewilayahan dan pemetaan partisipatif dapat membantu melihat potensi konflik lebih awal. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat menjadi forum untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik, jika masyarakat disadarkan mengenai manfaat ekonomi dan sosial sejak awal dan bersama-sama merencanakan pengelolaan seluruh manfaat itu.

- **Peraturan dan pengelolaan lahan harus memperhitungkan berbagai nilai.** Merangkul masyarakat agar terlibat perencanaan dan pengelolaan hutan untuk berbagai macam nilainya –nilai penghidupan, sosial dan budaya, keragaman hayati dan ekologi—akan memberikan berbagai kemampuan lain, pemahaman yang lebih baik dan proses REDD+ yang lebih menyeluruh dan lentur.

Sekalipun ada perbedaan sosial budaya, ekonomi, politik dan geografi antara Peru, Indonesia dan Kongo, masyarakat di tiga negara itu mendapatkan manfaat dari pewilayahan mikro dan pemetaan partisipatif. Semua proses itu menawarkan metodologi untuk menguji dan menyelesaikan konflik antar masyarakat, mengukuhkan penguasaan tanah dan penghidupan, dan membentuk landasan bagi mekanisme pembagian manfaat di masa depan.



© WWF/JULIE PUDLOWSKI

## KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN; PADIATAPA, IPLC DAN MANFAAT BERSAMA DARI REDD+

Di Peru, Indonesia dan Kongo, capaian besar kerja WWF dengan masyarakat dan komunitas lokal (IPLCs) adalah pengembangan visi REDD+ yang lebih menyeluruh dan inklusif. Di tiga kawasan itu, WWF telah mempromosikan, mendukung dan menghubungkan berbagai upaya di semua tingkatan –lokal, nasional dan internasional— untuk menjawab masalah PADIATAPA, hak-hak masyarakat dan adat, masalah mata pencaharian, dan berbagai strategi pembangunan rendah karbon. Kegiatan-kegiatan itu telah:

- Membantu membangun pengetahuan untuk meningkatkan PADIATAPA dari masyarakat adat dan komunitas lokal, dan persetujuan dan konsultasi secara penuh dalam berbagai kegiatan REDD+ di tingkat kawasan;
- Memperkuat hak-hak dan kemampuan masyarakat adat dan komunitas lokal dengan membekali mereka untuk memetakan, mengelola dan memantau sumber daya mereka sendiri, untuk meraih pilihan penghidupan dan sumber pendapatan, dan untuk terlibat lebih efektif dengan otoritas pemerintah dan sektor swasta;
- Mendukung penyusunan proposal masyarakat adat tentang REDD+, termasuk proposal *Amazonian Indigenous REDD+* yang telah dipresentasikan di forum-forum internasional, seperti Kongres Konservasi Dunia pada bulan September 2012 dan COP18 di Doha pada bulan Desember 2012;

- Membangun kemitraan dan koalisi seputar pendekatan berbasis hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk REDD+ yang lebih berpengaruh dan berdampak daripada yang dapat dilakukan oleh organisasi yang berkerja sendiri;
- Mempengaruhi penyusunan standar pengamanan nasional dan internasional dan kerangka kerja PADIATAPA, sehingga mengubah “aturan main” keterlibatan REDD+ dengan masyarakat adat di seluruh dunia;

- Menyusun bahan-bahan yang dapat dijangkau – termasuk makalah-makalah kebijakan ringkas publikasi informasi dan analisis, presentasi dan lokakarya – tentang masalah sosial REDD+ yang memberikan panduan praktis dan memungkinkan hubungan timbal balik antara kebijakan dan praktik.

### PELAJARAN DARI LAPANGAN

Hasil-hasil di atas tidak akan dapat diraih tanpa mengembangkan kapasitas, saling pengertian dan kepercayaan masyarakat adat dan komunitas lokal. Melalui proses ini, ada sejumlah pelajaran penting yakni:

- **REDD+ dibangun dengan rasa hormat.** Pelaksanaan REDD+ tidak akan berjalan tanpa kepercayaan (*trust*), penerimaan dan pengertian dari masyarakat adat dan lokal yang tergantung kepada hutan di kawasan kunci, dan rasa hormat merupakan langkah pertama menuju tiga kondisi yang memungkinkan itu terjadi. Membumikan pengembangan kapasitas dan proses-proses partisipatif dengan

rasa hormat kepada budaya dan pandangan hidup yang berbeda pada masyarakat-masyarakat adat dan agar kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi berujung pada hasil yang baik, dan menciptakan hubungan yang mendukung PADIATAPA, pemberdayaan dan perubahan yang bertahan lama.

- **PADIATAPA adalah proses membina hubungan yang baik, bukan proyek.** Menciptakan PADIATAPA lebih dari sekadar satu kegiatan atau program kerja – ini adalah proses menuju hubungan jangka panjang antar masyarakat, dan antara WWF dan masyarakat adat dan komunitas lokal. Bagian penting dari proses ini adalah membangun kepercayaan, yang akan bertahan lama dan memberikan dampak lebih besar daripada inisiatif tunggal manapun.

- **Bagi NGO konservasi global, seperti WWF, dan untuk keberhasilan pelaksanaan REDD+ secara terpadu, keterlibatan yang merangkul semua pihak harus mendukung pandangan-pandangan lokal mengenai proses REDD+.** Kemitraan yang kuat antara WWF dan organisasi lokal mengharuskan pengenalan wilayah-wilayah di mana konsensus dan kepentingan bersama dapat ditemukan dan aliansi yang terbentuk bersifat saling menguntungkan. Memang tidak selalu menjadi pengalaman yang mudah, namun hal itu memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih efektif dan mengarah pada hasil-hasil yang lebih baik.

## KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN; PADIATAPA, IPLC DAN MANFAAT BERSAMA DARI REDD+ LANJUTAN

■ **Proposal, visi dan rencana yang bersifat lintas budaya dan disusun bertahap meningkatkan legitimasi dan lebih efektif mendorong perubahan.** Meramu perspektif dan pengetahuan lintas budaya mendorong keterikatan, terlibat dan kepercayaan yang bersifat pribadi, sekaligus merangsang inovasi. Penyusunan lintas budaya dari proposal Amazonian Indigenous REDD+, sebagai contoh, menggabungkan pengetahuan tradisional dengan pendekatan ilmiah dan teknis – sebuah perpaduan inovatif yang memberdayakan masyarakat adat dan memberikan visi REDD+ yang kuat, lebih menyeluruh dan dinamis.

Di tiga kawasan itu, membangun rasa hormat dan kepercayaan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal dikenali sebagai langkah yang menentukan untuk menjadikan mitigasi dan pelestarian keragaman hayati membawa manfaat bagi masyarakat.

Dukungan untuk pandangan masyarakat setempat mengenai proses REDD+, menjawab kekhawatiran mengenai mekanisme pembagian manfaat dan pengurangan kemiskinan, dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan tentang hak-hak, penguasaan lahan dan pengaruh potensial terhadap REDD+ membawa ke arah hasil yang lebih baik – hasil yang menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendekatan berbasis hak dengan penerapan REDD+ yang benar-benar adil dan berkelanjutan.



© WWF/FAHRI

## KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN: KAWASAN DEFORESTASI NETO SEBESAR NOL (ZERO NET DEFORESTATION)

Di tiga kawasan hutan itu, program kerja WWF bermaksud menemukan dan menunjukkan berbagai jalan menuju ZND yang memberikan pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat kawasan hutan. Upaya WWF dengan fokus pada ZND di Peru, Indonesia dan Kongo bersifat saling bersinggungan dan saling mendukung, dan berguna untuk menciptakan alat-alat dan situasi yang memungkinkan terjadinya kemajuan ke arah ZND di masing-masing kawasan. bermanfaat untuk were cross-cutting and supportive, and served to create tools and conditions that enabled progress toward ZND in each landscape. Upaya-upaya itu mencakup:

- Penyusunan alat metodologis baru, kerangka kerja perencanaan pengelolaan komunitas (*Community Management Planning Framework*), yang memudahkan perencanaan pengelolaan lahan yang sepenuhnya partisipatif. Alat ini sudah diuji di lapangan di Desa Mpelu, Mai-Ndombe, dengan hasil berupa rencana pengelolaan yang disusun oleh wakil-wakil kelompok-kelompok sosial (usia lanjut, laki-laki, perempuan dan anak-anak muda) dalam masyarakat yang sudah berhasil mengamankan kepemilikan dan pilihan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan di tanah milik masyarakat mereka;
- Penciptaan alat-alat Pemetaan Nilai Konservasi (*Conservation Value Mapping*), yang sudah diuji di lapangan di Kutai Barat, Indonesia, yang memudahkan pengenalan wilayah dengan nilai konservasi yang tinggi dan rendah. Peta yang didapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah strategi alokasi lahan REDD+ melalui pengenalan terhadap lokasi-lokasi potensial untuk dijadikan wilayah konservasi masyarakat, tukar

guling lahan untuk menggeser perkebunan sawit ke lahan-lahan yang rusak, dan praktik pengelolaan manajemen yang lebih baik;

- Pembuatan platform untuk mendapatkan dan membagi alat-alat, modul pelatihan dan *lessons learned* untuk membangun pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan untuk bergerak menuju ZND.

### PELAJARAN DARI LAPANGAN

Upaya-upaya dengan fokus pada ZND ini memberikan sejumlah pelajaran penting:

- **Mengetahui kebutuhan dan pendapat masyarakat yang berhubungan dengan tanah mereka harus menjadi langkah pertama dalam proses pelibatan masyarakat.** Mendorong masyarakat untuk menelusuri dan mengungkapkan nilai-nilai kawasan mereka sangatlah menentukan – keberhasilan pengelolaan lahan, pewilayahan dan proses partisipatif lainnya, termasuk membidik dan mencapai ZND, akan tergantung kepada pembentukan visi awal ini.
- **Kadang-kadang masyarakat membutuhkan bantuan untuk merumuskan visi mereka.** Sekalipun mereka telah sangat berhasil mengembangkan kemampuan memahami hutan dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya, beberapa anggota komunitas mungkin tidak mampu mengenali ancaman-ancaman yang datang dari luar. Ini adalah wilayah di mana organisasi seperti WWF dan mitra-mitranya dapat menyumbangkan keahlian yang sangat berguna dan sangat membantu menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.

■ **Memastikan berbagai manfaat yang jelas dan mewujudkannya untuk sangatlah penting.** ZND bisa saja merupakan konsep yang rumit, karenanya sangat penting untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan-tindakan praktis yang memberikan manfaat-manfaat yang terukur. Menemukan cakupan dari manfaat-manfaat itu secara transparan dan partisipatif, menjamin manfaat itu dapat diwujudkan adalah langkah-langkah yang perlu untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Upaya WWF yang berfokus pada pencapaian ZND menghadapi banyak tantangan –utamanya adalah situasi politik yang berubah-ubah di kawasan-kawasan penting dan kesulitan komunikasi beserta penundaan yang mengikutinya. Meskipun demikian, upaya itu –beriringan dengan platform berbagi pengetahuan untuk pelaku REDD+ di manapun– telah membawa hasil baik dan secara terukur menyumbang kepada keseluruhan kerja WWF di Peru, Indonesia dan Kongo.

# KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN; MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN TEKNIS

Memahami masa lalu, masa kini dan masa depan hutan merupakan salah satu aspek paling penting dalam REDD+. Tanpa cara-cara untuk menilai dan mengukur jumlah karbon yang dapat diserap oleh pepohonan –MRV untuk pengurangan emisi menggunakan data lapangan dan penginderaan jauh– validasi yang terverifikasi dampak REDD+ terhadap kawasan tidak akan dapat dilakukan, dan tidak akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap prosesnya.

Program kerja WWF di Peru, Indonesia dan Kongo memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan teknis agar masyarakat dapat terlibat dan pada akhirnya menentukan arah dari proses MRV, dengan kemajuan yang signifikan. Warga masyarakat dan tim MRV setempat telah;

- Membuat peta karbon daerah, data deforestasi dan tingkat-tingkat acuan emisi yang sesuai standar internasional dan akan membantu strategi REDD+ nasional maupun daerah;
- Menumbuhkan keterlibatan dan kepemilikan pemangku kepentingan terhadap MRV dan informasi yang diperoleh. Seperti yang terjadi di Madre de Dios, Peru, proses-proses partisipatif menentukan metodologi pemetaan karbon melibatkan masyarakat setempat dalam memutuskan pilihan metodologi dan melakukan validasi terhadap hasilnya;
- Membangun kerjasama dengan lembaga akademis dan lembaga riset yang menonjol untuk bersama-sama mengembangkan alat dan kemampuan yang mendukung sistem MRV yang efektif, cukup murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat;
- Menciptakan sumber-sumber mereka sendiri untuk melanjutkan proses

saling belajar dan pengembangan kemampuan teknis seperti program sertifikasi MRV/REDD+ yang dikembangkan di Amazon National University, Madre de Dios;

- Menjadi anggota gugus tugas dan komite regional dan nasional untuk merancang dan menerapkan sistem MRV dan tingkat-tingkat acuan pada skala yang lebih besar;
- Terlibat dalam forum-forum regional dan global untuk membagi pengalaman dan keterampilan yang didapat dari kegiatan yang berhubungan dengan MRV tingkat-tingkat emisi acuan.

Metodologi MRV yang dikembangkan di tiga kawasan itu sekarang menjadi acuan bagi para pelaku dan pelaksana MRV lainnya secara global. Hal ini telah menempatkan WWF dan para anggota timnya di lapangans sebagai pemangku kepentingan, konsultan dan kordinator yang penting dalam diskusi di tingkat nasional maupun internasional, memberikan keahlian dan panduan untuk masalah MRV kepada lembaga-lembaga geospasial, donor dan pemerintah di seluruh dunia.

## PELAJARAN DARI LAPANGAN

Upaya pengembangan kapasitas teknis yang dilakukan WWF telah memberikan pelajaran-pelajaran penting sebagai berikut:

- **Alat-alat MRV perlu dibuat lentur, mudah diakses dan sesuai konteksnya. Alat-alat teknis harus dikembangkan dengan memperhatikan situasi, teknis dan kapasitas setempat.** Tidak ada standar atau pendekatan tunggal untuk MRV yang sesuai untuk semua negara,

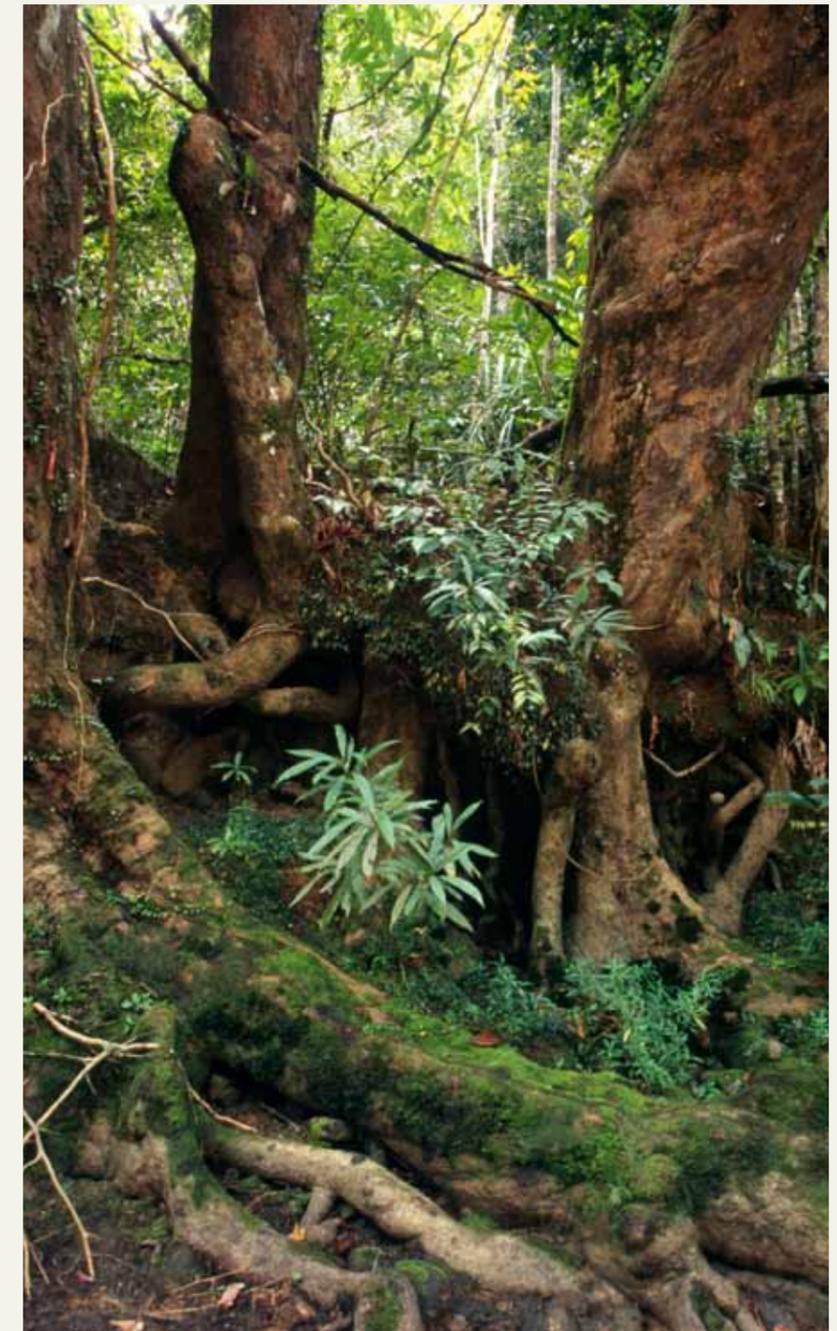
daerah atau masyarakat, karena setiap pengaturan alat-alat itu harus masuk ke dalam kenyataan sosial dan politik dan keadaan geografis masing-masing yang unik. Bahkan jika semua efektif, alat-alat yang tidak sesuai untuk sebuah masyarakat atau konteks tertentu akan menghambat kerja dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan kapasitas teknis.

- **Memiliki batas minimum kemampuan lokal untuk kerja teknis yang benar-benar partisipatif sangatlah penting.** Hal ini relevan khususnya ketika ada pembicaraan teknis dan ilmiah mengenai subjek-subjek yang rumit dan bisa membingungkan, seperti MRV. Menentukan rencana dan tujuan-tujuan konkret untuk bergerak maju menjadi mudah ketika kemampuan teknis yang tepat tersedia. Hal itu menjadi mudah jika ada massa kritis yang terampil dan berwawasan di wilayah tersebut, seperti yang dilakukan dengan program sertifikasi MRV/REDD+ yang dikembangkan di Madre de Dios.

- **Pengembangan kapasitas yang konsisten, berkelanjutan dan berjangka panjang sangatlah menentukan keberhasilan proses REDD+.** Perubahan yang besar atau gejolak politik dapat merusak hasil yang sudah dicapai dan mengganggu proses REDD+, jika tidak ada landasan kemampuan teknis yang kuat di tingkat lokal, dan jika kemampuan-kemampuan itu berasal dari luar negeri. Membangun sistem yang mampu menjamin pengembangan kapasitas jdalam jangka panjang, seperti program sertifikasi MRV/REDD+ di Madre de Dios, dapat mendukung keberlangsungan proses REDD+ sekalipun sering terjadi perubahan politik.

- **MRV bukan soal presisi dan akurasi, melainkan legitimasi.** Karena dapat digunakan untuk membentuk kebijakan politik dan memberikan legitimasi kepada kebijakan tingkat tinggi mengenai pemanfaatan lahan, MRV bukanlah sekadar proses teknis. Kegiatan ini juga merupakan proses politik, yang didukung dengan data. Karenanya, data harus digunakan secara transparan dan didapat melalui cara yang sesuai aturan dan dapat diverifikasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Di lapangan maupun di publikasi media daring, pengembangan kemampuan di Peru, Indonesia dan Kongotelah terbukti memiliki konsekuensi yang luas. Pengetahuan dan alat-alat teknis dapat meningkatkan penghidupan masyarakat dan kepemilikan yang lebih besar terhadap proses REDD+, sekaligus juga menjamin REDD+ berjalan sesuai aturan dan transparan.



## KENCENDERUNGAN LINTAS KAWASAN; PROSES BELAJAR DAN BERBAGI PENGETAHUAN

Setelah kerja WWF di Peru, Indonesia dan Kongo bergulir dan terbuka, didapat sejumlah pelajaran penting yang tidak diduga. Pelajaran-pelajaran ini memperdalam pemahaman WWF mengenai arti REDD+ di lapangan –kekuatannya, batasan-batasannya dan apa saja yang dapat menghambat REDD+ dalam memberikan hasil yang baik.

Sejak awal program kerja ini, WWF telah berupaya menjangkau pihak-pihak lain dan membagi pengetahuan ini untuk memberdayakan organisasi konservasi lainnya, pelaku-pelaku REDD+ dan masyarakat lokal untuk terlibat dan mempengaruhi dialog internasional tentang REDD+ dan pelaksanaannya. Untuk tujuan itu, WWF telah menyusun sebuah strategi yang baru dan diterima dengan baik oleh banyak kalangan untuk menangkap dan membagi pelajaran yang didapat dari berbagai upaya di masing-masing kawasan itu. Strategi-strategi itu mencakup:

- Sebuah platform baru untuk belajar dan pengembangan kapasitas secara daring, yang kita sebut Komunitas REDD+ dan dapat dilihat di <http://www.reddcommunity.org>, secara gratis dan terbuka bagi para pelaku REDD+ dari kalangan pemerintah, organisasi nirlaba, organisasi masyarakat, organisasi multinasional organization, dunia usaha dan sektor lain untuk mendorong pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan lintas kawasan REDD+. Kurang dari setahun sejak diluncurkan, komunitas dunia maya itu sudah memiliki 448 di lebih dari 50 negara di dunia.;
- Serial “Inspiring Practices” yang merangkum lebih dari 38 *lessons learned* dalam bentuk manual, lembar data dan cakram padat untuk praktisi MRV and REDD+ di seluruh dunia, tidak terkecuali mereka yang ada di daerah terpencil tanpa sambungan internet berkecepatan tinggi;
- Satu seri Learning Sessions, seminar daring bulanan dan gratis yang menampilkan para ahli REDD+ mendiskusikan masalah-masalah penting sehingga para pelaku di seluruh dunia mendapatkan informasi terbaru mengenai REDD+. Seluruh presentasi itu kemudian direkam dalam bentuk video yang mudah ditonton di laman resmi WWF ([www.panda.org](http://www.panda.org)) atau saluran WWF’s *Forest and Climate* di YouTube. Sampai saat laporan ini disiapkan, saluran WWF di Youtube sudah ditonton lebih dari 2,350 kali;
- Berbagai publikasi penting, seperti *REDD+ for People and Nature: a case study of an integrated approach to REDD+ in the DRC* dan *WWF Guide to Building REDD+ Strategies*, yang tersedia untuk masyarakat REDD+ internasional dalam berbagai bahasa sehingga dapat menjangkau pembaca yang luas dari kalangan yang berpengaruh, termasuk para pejabat pemerintah, pelaku REDD+, masyarakat adat dan pembuat kebijakan internasional.

Ketika para pelaku REDD+ di seluruh dunia belajar melakukannya, alat-alat itu memberikan pusat sumber-sumber pengembangan kemampuan, informasi teknis dan berbagai panduan yang memudahkan proses berbagi pengetahuan Selatan-Selatan untuk mendukung keberhasilan berbagai inisiatif mereka.



© WWF/DAMIAN VARIA

## KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN; REDD+ DI TINGKAT YURISDIKSI/SUBNASIONAL

Di Peru, Indonesia dan Kongo, program kerja WWF mengikuti pendekatan yurisdiksi/subnasional untuk REDD+. Inti dari pendekatan ini adalah mengakui bahwa REDD+ harus dinilai pada skala yang cukup berarti –tidak dapat diterapkan dengan pendekatan dari atas ke bawah secara nasional di negara-negara dengan kenyataan-kenyataan yang rumit, berbagai kebutuhan yang saling bersilangan, dan pemerintahan maupun kemampuan teknis yang terbatas, namun hal itu juga tidak dapat berjalan dalam proyek yang berskala kecil dan terkungkung.

Sebaliknya, REDD+ di tingkat yurisdiksi/subnasional dapat berjalan dalam kawasan di tingkat subnasional, dengan intervensi yang saling berpotongan dan saling menguatkan, dengan pusat perhatian pada pengembangan kapasitas, sistem pengaman dan pelibatan untuk REDD+ dari bawah ke atas. Dengan pendekatan ini, REDD+ dapat diterapkan dan diuji pada skala yang memiliki arti cukup secara hayati, karena mampu menampung ekosistem yang utuh, dan berarti secara sosial maupun politik, karena hal itu selaras dengan yurisdiksi yang diakui, seperti provinsi yang ditetapkan pemerintah, departemen atau distrik. Pada skala ini, REDD+ dapat dikelola secara efektif oleh atau dengan pemerintahan di tingkat nasional atau subnasional untuk mempertahankan beberapa kawasan paling penting di dunia.

Di lapangan, hal itu berarti:

- Di tingkat **masyarakat**, memberdayakan organisasi masyarakat sipil dan lokal dan masyarakat yang bergantung kepada hutan untuk terlibat dengan proses REDD+ meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola sumber-sumber kehidupan mereka sendiri dan memiliki suara yang lebih didengar dalam inisiatif-inisiatif REDD+. Hal ini dapat diwujudkan melalui;
  - Pengembangan kapasitas di tingkat masyarakat, seperti pelatihan MRV lintas kawasan dan program sertifikasi MRV/REDD+ di Madre de Dios;
  - Penguatan hak-hak adat dan penguasaan tanah, sebagaimana ditunjukkan oleh pengembangan REDD+ untuk masyarakat adat di Madre de Dios, perencanaan hutan masyarakat di Kutai Barat, dan inisiatif pemetaan dan pelayahan mikro di Mai-Ndombe dan Kutai Barat.
- Pada tingkat **subnasional**, mengembangkan mekanisme dan forum-forum untuk menyelenggarakan dialog dan saling belajar antar anggota komunitas/organisasi masyarakat sipil dan berbagai inisiatif nasional dan regional. Pelibatan pada berbagai tingkatan memberi hasil berupa:
  - Proses partisipatif yang diakui resmi oleh pemerintah seperti Madre de Dios Roundtable on Environmental Services and REDD+, dan Amazonian Indigenous REDD+ Roundtable yang diakui secara regional;
- Memanfaatkan berbagai model dan kerangka hukum di tingkat regional, misalnya penggunaan aturan desa dan penetapan hutan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melindungi pelayahan mikro dan pengelolaan yang dikembangkan oleh komunitas;
- Kemitraan yang baru dibentuk antar komunitas, sektor swasta (misalnya, perusahaan kayu di Kutai Barat) dan pemerintah kabupaten/regional yang menjembatani celah lokal-regional.
- Di tingkat **nasional dan global**, menarik pelajaran dan metodologi yang dikembangkan oleh komunitas dan pemerintah subnasional untuk menentukan parameter strategi REDD+ di tingkat nasional dan untuk memudahkan dalam menyusun mekanisme, kelembagaan dan pembiayaan REDD+ di tingkat global. Hasil dari semua proses itu mencakup:
  - Pengakuan Inisiatif Ekonomi Hijau Kutai Barat oleh Satgas Nasional REDD+ dan FCPF;
  - Validasi nasional dan penerapan panduan PADIATAPA di berbagai provinsi yang dikembangkan melalui proses partisipatif di Mai-Ndombe;
  - Diterimanya ER-PIN oleh Pemerintah Kongo, yang menunjukkan kerjasama efektif antara masyarakat dan upaya regional di Mai-Ndombe dan pemerintah nasional.

## KECENDERUNGAN LINTAS KAWASAN; REDD+ DI TINGKAT YURISDIKSI/SUBNASIONAL LANJUTAN

### PELAJARAN DARI LAPANGAN

Hubungan antara intervensi dan partisipasi lokal, subnasional dan nasional telah memberikan sejumlah pelajaran untuk bekerja di tingkat yurisdiksi/subnasional:

■ **Mengembangkan kebijakan publik yang berhasil dapat diraih dengan menggabungkan dua pendekatan; atas-bawah dan bawah-atas.** Agar bisa efektif, REDD+ harus berjaan secara nasional sekaligus juga di tingkat masyarakat dan pemilik tanah. Inilah sasaran dari upaya REDD+ di tingkat yurisdiksi/subnasional – meningkatkan kemampuan dan belajar dan menerapkan pelajaran-pelajaran penting pada setiap tingkatan karena semua tingkatan adalah penting. Di tingkat lokal, ada pengetahuan penting yang dapat memberi umpan pada tingkat subnasional atau nasional, sementara kemauan politik pada tingkat nasional dapat mendorong perubahan penting di tingkat lokal atau subnasional. Memadukan pendekatan-pendekatan ini dapat menghasilkan strategi dan kebijakan yang lebih baik.

■ **Berbagai upaya di tingkat komunitas, subnasional dan nasional harus cocok dan terkordinasi sepanjang proses REDD+.** Kerja REDD+ yang berhasil menuntut kesesuaian dan keterpaduan pada semua tingkat keterlibatan. Menjamin para pemangku kepentingan pada semua rtingkatan terlibat sejak awal dan kegiatan-kegiatan itu diakui dari atas ke bawah dan sebaliknya akan memudahkan perluasan pada saat yang akan datang. Kurangnya kordinasi antara tingkat lokal, subnasional dan nasional menghambat kerja di Madre de Dios, sementara kordinasi yang erat memberi hasil yang positif di semua tingkatan di Mai-Ndombe, Kongo.

■ **Kelenturan dan kesederhaan adalah kunci.** Program-program REDD+ menuntut hubungan antara berbagai tingkatan, yang masing-masing memiliki kerumitannya sendiri dan mungkin mengalami perubahan besar ketika program tengah berjalan. Kerumitan semacam ini terentang dari masalah-masalah hukum dan tata kelola pemerintahan sampai persyaratan teknis untuk pengumpulan data hutan dan MRV. Dengan demikian, REDD+ haruslah sederhana dan lentur, serta komprehensif sehingga selalu mampu menyesuaikan diri dengan kerumitan dan perubahan pada setiap tingkat pelaksanaan.

Tiga tahun setelah dimulainya program kerja WWF di tiga kawasan itu, sebuah konsensus terlihat menuju ke arah pelaksanaan REDD+ pada skala yurisdiksi/subnasional. Banyak pendukung dan penerima manfaat penerapan REDD+ – dari Dana Karbon Bank Dunia sampai negara dengan hutan yang luas seperti Brazil dan Indonesia– akan menggunakan pendekatan yang memberikan preferensi untuk bekerja di tingkat negara bagian, provinsi atau kabupaten, dengan pengakuan terhadap keunggungan unik yang dapat diberikan oleh program pada skala itu.

MEMBANGUN REDD+ UNTUK MASYARAKAT DAN ALAM - DAMPAK DAN KECENDERUNGAN



# PELUANG UNTUK MEMPERLUAS REDD+ DAN MENGEMBANGKAN INISIATIF-INISIATIF BARU REDD+

Program kerja REDD+ WWF di Peru, Indonesia dan Kongo telah memberikan model-model yang meyakinkan pada tingkat kawasan yang mendukung pendekatan, pembiayaan dan keterlibatan nasional dan internasional REDD+. Keberhasilan dan tantangan dari kerja ini membuka sejumlah alur potensial untuk melaksanakan proses REDD+ yang menguntungkan masyarakat dengan cara yang bermakna dan bertahan lama.

Saat ini WWF cukup yakin untuk membawa pekerjaan ini ke tahapan baru, yang akan merealisasikan potensinya dengan melanjutkan dan mengkonsolidasikan program-program di tingkat kawasan, melipatgandakan program ini melalui pelaksanaan di kawasan-kawasan tambahan, dan menerapkan pelajaran yang didapat dari pelaksanaan sebelumnya.

**Keberlanjutan dan konsolidasi** akan menyangkut pengembangan lebih jauh lagi dari pekerjaan yang sedang berjalan di kawasan-kawasan hutan yang penting di Madre de Dios, Kutai Barat dan Mai-Ndombe, untuk mencakup:

- Mendukung pelaksanaan REDD+ yang khas dan sesuai konteksnya, dan terus mengembangkan kapasitas yang berhubungan dengan masalah penguasaan tanah, PADIATAPA dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal;
- Menyelesaikan rencana tata guna lahan di tingkat masyarakat dan kawasan berdasar peryilayahan partisipatif mikro dan makro;
- Mengembangkan dan memperkenalkan mekanisme pembiayaan yang teratur dan dapat diperkirakan berdasar kriteria pengurangan emisi karbon, insentif produksi berkelanjutan dan skema pembagian manfaat;

- Merawat perubahan kebijakan dan susunan kelembagaan yang akan memperkuat lebih jauh lagi tata kelola hutan di wilayah masing-masing;
- Memastikan upaya REDD+ di tingkat kawasan dan nasional dikordinasikan lebih baik atau diposisikan sebagai bagian dari konteks bersanya agar pengaruh dan efektivitasnya optimal;
- Mengintegrasikan kerja REDD+ ke dalam rencana dan strategi tata guna lahan dan pembangunan ekonomi.

**Mengembangkan inisiatif REDD+ tambahan** akan menyangkut melakukan kerja di kawasan yang sejenis di tiga kawasan hutan; hutan Amazon di Guyana dan Provinsi Putumayo di Kolombia. Dan hutan hujan Ngoyla Mintom di sisi selatan Kamerun.

Upaya-upaya di Guyana akan berpusat pada kawasan pegunungan, sungai dan hutan hujan seluas kira-kira 400,000 hektar yang merupakan rumah dari berbagai komunitas masyarakat adat. Di Putumayo, Kolombia, kerja itu akan berpusat pada wilayah seluas 2.6 juta hektar yang membentang dari hutan hujan di dataran rendah sampai ke ketinggian pegunungan Andes yang tengah terancam deforestasi dan degradasi hutan. Di kawasan Ngoyla Mintom yang seluas 900,000 hektar, program kerja REDD+ WWF akan menghadapi tantangan dari kegiatan perburuan dan jual beli binatang liar, penebangan dan pertambangan liar dan perluasan kegiatan pertanian.

Seperti Madre de Dios, Kutai Barat dan Mai-Ndombe, tiga kawasan tambahan yang strategis ini sangat berbeda konteks budaya, ekonomi, politik, dan geografinya. Tiga kawasan itu menawarkan peluang untuk menguji berbagai model dan *lessons learned* di tiga

kawasan unik dengan lingkungan yang rumit, dan menjanjikan pelajaran, penemuan dan strategi baru yang mungkin dapat menjadi pijakan kerja REDD+ di seluruh dunia.

**Perluasan REDD+** akan berkait dengan berbagai pendekatan. WWF akan ikut menyumbang kepada penyusunan kebijakan dan kerangka kerja REDD+ nasional dengan memperkuat koordinasi atau “menempatkan diri” di antara kerja di tingkat lokal dan kawasan dan kerja di tingkat nasional – hukum, kebijakan, standard dan penerapan berbagai ukuran yang bisa melindungi program REDD+ ketika semua itu siap dijalankan.

Secara paralel, WWF akan mendukung kesepakatan REDD+ di tingkat regional dan lintas negara, seperti *Joint Declaration of Intent on REDD+* di Cekungan Kongo, yang menyelaraskan berbagai pendekatan di berbagai negara dalam satu wilayah besar. Kesepakatan semacam itu dapat memudahkan peningkatan kapasitas, menciptakan peluang berbagi pengetahuan, dan memperkuat struktur pendanaan. WWF juga akan bekerja untuk memperluas agenda penelitian kebijakan REDD+ untuk mempengaruhi kebijakan nasional, regional dan internasional, untuk merawat kesepakatan global mengenai REDD+. Hasil dari agenda ini – bangun pengetahuan yang sudah teruji, ditarik dari pelajaran yang didapat dari kerja REDD+ di tingkat kawasan – akan memudahkan dalam memandu debat kebijakan internasional berdasar kenyataan REDD+ di lapangan sehingga sebuah dialog yang kaya dan efektif dapat berjalan.



# KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN: MEMBANGUN HUBUNGAN LOKAL-GLOBAL

Salah satu sasaran fundamental kerja WWF di Peru, Indonesia dan Kongo adalah untuk mempengaruhi kebijakan internasional REDD+ dan struktur pendanaannya – untuk memelihara komitmen, pengaturan pendanaan, kapasitas dan kelembagaan internasional dan internasional yang mampu menjamin pengakuan untuk dukungan pelestarian keragaman hayati dan pembangunan komunitas rendah karbon di masa yang akan datang.

Hal ini sangat penting pada saat tidak ada kesepakatan global mengenai REDD+. Sejak awal program kerja WWF di tiga kawasan hutan itu, negosiasi internasional telah gagal mencapai kesepakatan mengenai mekanisme dan kebijakan global REDD+, dan arena REDD+ telah menjadi semakin terpecah-pecah. Sebuah kesepakatan mengenai REDD+ diperlukan jika mekanisme ini harus memberikan seluruh manfaat ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dibutuhkan oleh hutan, dan kesepakatan itu harus berakar pada kenyataan yang ada di lapangan.

Hasil di Madre de Dios, Kutai Barat dan Mai-Ndombe telah menunjukkan arah menuju sebuah kesepakatan. Seluruh kerja di kawasan-kawasan kunci telah melahirkan model-model dan kerangka kerja dan menunjukkan beberapa unsur penting dari sebuah mekanisme REDD+ yang terpadu, adil dan efektif. Seluruh kerja itu juga mencakup langkah-langkah pembuka yang signifikan ke arah dukungan dan pendanaan internasional untuk persiapan dan pelaksanaan REDD+ yang terus berjalan dan makin luas, yang membawa kita menuju;

- Pelaksanaan ER-PIN Kongo, upaya pertama menuju REDD+ di tingkat yurisdiksi di Benua Afrika, dengan kemampuan menarik sampai US\$60 juta dalam bentuk pembayaran REDD+ dan mempengaruhi 300,000 rumah tangga di kawasan seluas 12 juta hektar sembari menurutkan deforestasi sampai setengahnya secara berkelanjutan;
- Pemilihan Kongo sebagai satu dari delapan negara perintis untuk didukung oleh FIP, dengan investasi sebesar US\$15 juta;
- Kemajuan yang dipandu oleh Norad dan *endorsement* Kongo *Congo Basin Declaration*, yang meminta percepatan REDD+ di Cekungan Kongo melalui komitmen negara-negara donor untuk menggerakkan dukungan teknis dan keuangan dan komitmen negara-negara pemilik hutan terhadap pembangunan berkelanjutan, sembari menyelesaikan berbagai penyebab deforestasi dan mendukung perbaikan tata kelola hutan dan perencanaan tata guna lahan secara partisipatif;
- Penyusunan proposal Peru kepada Fasilitas Kemitraan Hutan karbon (*Forest Carbon Partnership Facility*), Dana Bank Dunia untuk Biokarbon (*World Bank BioCarbon Fund*), dan Inter-American Development Bank, utamanya untuk mendukung proses REDD+ di Madre de Dios;
- Negosiasi pengalihan utang-pelestarian alam (*debt-for-nature swap*) sebesar US\$28.5 juta antara Amerika Serikat dan Indonesia yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi “hijau” di tiga kabupaten kritis, termasuk Kutai Barat;

- Peningkatan kapasitas di tiga kawasan untuk mempelajari “aturan main” – pendekatan paling efektif untuk menyusun dan menyampaikan gagasan ke masyarakat internasional – dalam mendapatkan dana.

Tetapi hubungan antara kerja WWF di tingkat lokal di tiga kawasan hutan penting itu dan pembiayaan dan kebijakan global REDD+ tidak terbatas pada komitmen pendanaan. Ini juga menyangkut proses berbagi pengetahuan dan pendalaman dialog internasional mengenai bagaimana membuat REDD+ dapat berjaya. Untuk mencapai tujuan itu, WWF dan mitra-mitra lapangannya di Peru, Indonesia dan Kongo telah berhasil memberikan sumbangan tambahan yang penting, mencakup:

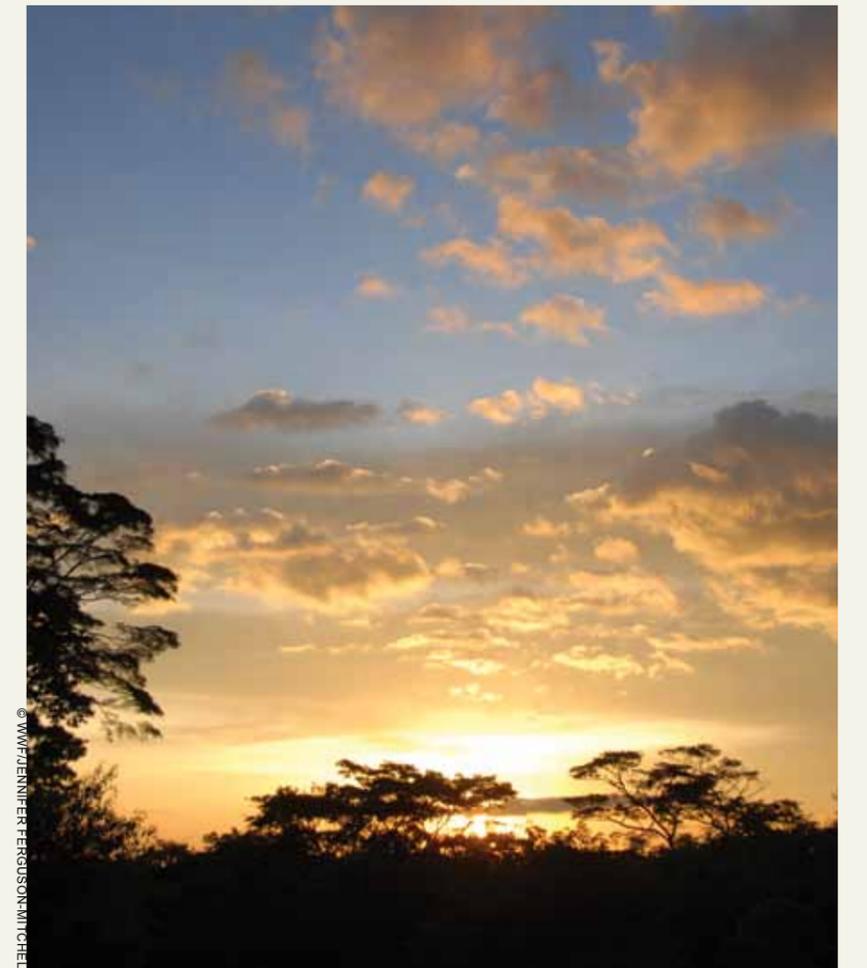
- Menetapkan *REDD+ Five Guiding Principles*, yang dirancang oleh WWF, CARE International dan Greenpeace di bulan Mei 2010, menetapkan standar dan indikator sederhana untuk memudahkan dalam memastikan REDD+ berjalan demi kepentingan rakyat dan alam;
- Memproduksi berbagai publikasi penting mengenai peningkatan kapasitas, termasuk *WWF Guide to Building REDD+ Strategies: A toolkit for REDD+ practitioners around the globe*, yang memberikan cetak biru untuk penyusunan strategi REDD+ di tingkat nasional dan subnasional dan menawarkan sumber utama untuk pengembangan kapasitas lokal dan nasional mengenai REDD+;
- Bekerjasama dengan para ahli kebijakan di hutan dan iklim internasional di WWF dan kantor-kantor WWF di seluruh dunia untuk memastikan pelajaran dari topik-topik penting REDD+ di tingkat subnasional masuk ke dalam kebijakan nasional dan internasional;

- Menyediakan dukungan teknis dan strategis yang penting – termasuk pelatihan, lokakarya, konsultasi, penulisan dan pengkajian dokumen dan proposal REDD+ – bagi kantor-kantor nasional WWF dan mitra lokal untuk penyusunan strategi REDD+ di tingkat nasional dan subnasional di Kongo, Indonesia dan Peru;
- Mendukung keterlibatan wilayah kerja dan WWF dengan pemangku kepentingan REDD+ di tingkat internasional (UNFCCC, FCPF, Bank Dunia, Inter-American Development Bank) untuk memajukan REDD+.

Seluruh kontribusi itu memberikan alat-alat teknis dan informatif yang penting kepada masyarakat internasional – dari pelaku REDD+ di lapangan sampai pejabat tinggi dan pembuat keputusan – untuk mempengaruhi dan memajukan dialog mengenai pelaksanaan REDD+. Bermitra dengan lembaga-lembaga riset yang diakui secara global, WWF akan terus berkerja untuk menghasilkan agenda riset kebijakan REDD+ dengan fokus pada mengumpulkan, menguji secara ilmiah dan membagi pelajaran berharga dari kerja nyata REDD+ dan para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Pengetahuan (*body of knowledge*) yang dihasilkan akan berguna untuk mendorong dan memudahkan pertukaran pengetahuan Selatan-Selatan, dan untuk mendorong sistem nasional sembari menguji pendekatan-pendekatan kebijakan nasional. Pengetahuan itu juga akan memberikan panduan yang sangat diperlukan bagi pembuat kebijakan global mengenai masalah kebijakan REDD+ dari sudut lintas ilmu yang penting, seperti tingkat-tingkat acuan, pengaman sosial dan keragaman hayati, penyebab-penyebab deforestasi,

sumbu-sumbu pendanaan dan pembiayaan berbasis hasil. Ketika proses REDD+ di Madre de Dios, Kutai Barat dan Mai-Ndombe terus bergulir, dan berbagai model terus bertambah di kawasan-kawasan lain yang sama rumit dan kritisnya, pengetahuan ini dan perdebatannya di dunia internasional akan terus berkembang – menuju pembentukan mekanisme di masa depan yang secara global berfungsi dan menjamin REDD+ dengan panduan dan sasaran yang jelas.



# KESIMPULAN: MENATAP MASA DEPAN

WWF memulai program kerja di Peru, Indonesia dan Kongo untuk mencari sejumlah jawaban. Di tiga kawasan yang kaya keragaman hayati, WWF mulai belajar melawan perubahan iklim dan melindungi hutan-hutan yang sangat bernilai ekologis bagi dunia sembari mengupayakan pemenuhan hak dan penghidupan masyarakat yang bergantung kepada hutan. Iktikad itu harus terwujud melalui keberhasilan dan tantangan dari kerja di lapangan untuk melaksanakan REDD+ yang benar-benar menguntungkan masyarakat dan alam.

Tiga tahun kemudian, program yang berjalan di tiga negara hutan memberikan lebih dari sekadar jawaban. Program kerja itu juga akan mentransformasi banyak masyarakat dan gagasan. Kelompok-kelompok yang biasanya tersisih akan mendapatkan pemberdayaan dan pengaruh. Orang-orang dan masyarakat di tiga kawasan itu akan mendapatkan keterampilan, pendapatan dan peluang pendidikan, dan pengetahuan baru mengenai hak-hak ekonomi dan sosial. Pemerintah mengakui hak-hak atas hutan dari masyarakat adat dan lokal, pada beberapa kasus itu adalah pengalaman pertama. Strategi dan kebijakan nasional terus tumbuh dengan proses-proses yang sepenuhnya inklusif dan partisipatif dan pelajaran-pelajaran baru dari kenyataan setempat. Para pihak yang bergesekan kepentingan akan berkumpul untuk menemukan kesepakatan bersama dan bertindak bersama-sama untuk mencapai sasaran-sasaran itu.

Di hutan-hutan hujan pedalam di Kutai Barat, Indonesia, para penduduk desa saat ini tengah menyusun rancangan peraturan untuk menetapkan, melestarikan dan mengelola hutan yang menjadi sandaran hidup mereka sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Kutai Barat sedang menelusuri penggunaan sumber energi alternatif, seperti aliran air dan

jeram-jeram (*hydropower*) untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penghidupan mereka. Mereka membentuk kemitraan yang belum pernah ada di masa lalu, dengan perusahaan kayu dan otoritas pemerintahan setempat, dan mendapatkan pengakuan dalam proses itu. Kelompok-kelompok masyarakat adat Amazon di kawasan di kawasan Madre de Dios, tengah berupaya mendapatkan pengaruh mereka pada proses-proses REDD+ dan menunjukkan visi masyarakat adat yang inovatif kepada dunia. Universitas di wilayah-wilayah itu merintis program sertifikasi MRV dan REDD+, berupa pelatihan bagi kenerasi baru ahli-ahli kehutanan setempat untuk mengelola hutan dan sistem penghitungan karbon untuk masa depan. Masyarakat-masyarakat di kawasan Maï-Ndombe yang luas di Kongo bekerja bersama-sama untuk memperbaiki ER-PIN yang mendapatkan tanggapan internasional, yang lahir dari upaya mereka. Mereka telah mendapatkan kemampuan teknis untuk mengukur dan memantau tutupan hutan mereka untuk membuat keputusan yang matang mengenai pengelolaan tanah-tanah mereka. Di Nkala, Maï-Ndombe's, Kepala Desa Mambe Ngono sekarang bisa dengan bangga bercerita kepada tamunya bahwa peta wilayah dan pemanfaatan lahan yang dibuat oleh dia dan tetangga-tetangganya telah membawa perdamaian bagi masyarakatnya.

Di masing-masing kawasan itu, masih ada tantangan berikut; pohon-pohon masih saja ditebangi, emisi karbon masih berlangsung, dan laju deforestasi belum cukup rendah untuk menghambat hilangnya hutan. Tetapi, transformasi baru dimulai. Madre de Dios, Kutai Barat dan Maï-Ndombe semuanya menunjukkan tingkat keterlibatan dan penerimaan masyarakat, mekanisme pengakuan dan perlindungan hak-hak, dan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan yang sebelumnya tidak pernah ada. Implikasi dari perubahan ini sangat besar dan luas.

Kemampuan-kemampuan baru dan keadaan yang menguntungkan selama program kerja ini telah meletakkan landasan bagi proses REDD+ untuk terus bergulir dan makin luas di tiga kawasan itu, dan telah memberi pelajaran kritis untuk strategi REDD+ nasional dan regional di negara-negara itu dan di tempat-tempat lain di dunia. Keberhasilan dan tantangan yang ditemukan di sini menuntun ke arah mekanisme REDD+ yang efektif yang mampu membawa manfaat bagi masyarakat dan alam pada skala yang besar. Mungkin yang paling penting, semua itu menonjolkan peran baru REDD+.

Masyarakat internasional yang berisi para pembuat kebijakan, donor, organisasi-organisasi pelaku konservasi dan REDD+ --termasuk WWF—telah sejak lama menganggap REDD+ sebagai tujuan itu sendiri, sebuahslusi untuk diterapkan di hutan-hutan hujan utama di bumi untuk menjaga keragaman hayati, mengurangi emisi karbon dan melawan perubahan iklim untuk kebaikan dunia. Namun namun kerja WWF di Peru, Indonesia dan Kongo telah menunjukkan bahwa REDD+ bukan solusi melainkan alat. Ia memainkan peran kritis dalam menemukan solusi, dan tidak boleh dikucilkan dari konteks dan proses yang lain.

Untuk mencapai tingkat penurunan emisi yang berarti, manfaat dan keterlibatan komunitas, pengaruh nasional dan global dan dampak jangka panjang, REDD+ harus dilihat dan dilaksanakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup berbagai bagian dalam masyarakat. REDD+ harus dipadukan dengan perencanaan tata guna lahan partisipatif untuk menjawab masalah dampak sektor pertanian, industri ekstraktif, pengelolaan hutan dan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu perlindungan hutan. REDD+ harus menjawab berbagai masalah dasar deforestasi dan degradasi dan emnjadi

bagian dari kebijakan pemerintah untuk sektor kehutanan. Ia harus tertanam dalam perencanaan ekonomi, seperti strategi pembangunan rendah karbon atau pertumbuhan yang ramah lingkungan, sebagai investasi untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Sederhananya, REDD+ harus melayani masyarakat, daerah atau negara yang menjadi tempat pelaksanaannya —meingkatkan keragaman hayati, penghidupan, hak-hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan— dan harus memberi imbalan untuk hasil yang dicapai di masing-masing wilayah. Hanya dengan itu REDD+ bisa membawa pengaruh pada perubahan yang dibutuhkan dunia.

Meninjau kembali REDD+ sebagai alat menuju tujuan yang lebih besar dapat disebut revolusioner, dan membutuhkan pendekatan baru pelestarian lingkungan. Ketika melihat ke masa depan, semua itu mengubah strategi dan mengembangkan visi baru WWF berdasar pelajaran dari program di masa lalu atau yang sedang berjalan. WWF dan mitra-mitranya di lapangan akan bekerja untuk memastikan model-model REDD+ di Peru, Indonesia dan Kongo dikembangkan dan disebarluaskan dalam kreangka kerja yang lebih luas dari pemanfaatan lahan, pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan ramah lingkungan di tingkat nasional yang terintegrasi, dengan hubungan yang diperkuat dengan kebijakan REDD+ global. Kerangka kerja yang lebih besar ini dan kaitan-kaitannya akan menjadi dasar bagi keberhasilan kesepakatan ataupun tindakan mengenai perubahan iklim global.

Visi baru ini dilengkapi oleh kesadaran bahwa perancangan “proyek” dan model-model konservasi mungkin tidak menemukan tantangan dari konteks yang dinamis dan rumit di mana REDD+ dikembangkan. WWF mengakui bahwa upaya sejenis di masa depan

tidak akan lagi menjadi sistem belajar di mana para pelaku dan pemangku kepentingan di lapangan dapat menguji dan merancang REDD+ sambil berjalan, membangun model untuk sesuatu yang akan bermanfaat di masa depan, berdasar pelajaran yang mereka tangkap dari proses itu. Mempelajari. Menyarikan dan membagi pengalaman belajar dan menciptakan proses dan kemampuan baru di tengah kerumitan dan perubahan, akan menjadi penting dalam fase pelaksanaan REDD+ ini.

Inilah saat yang menentukan bagi REDD+. Selama tetap ada di jalur yang benar, mekanisme ini akan memberikan peluang yang sangat besar bari pelestarian hutan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara tropis, yang belum pernah kita lihat. REDD+ juga bisa melawan perubahan iklim dengan mengurangi sumber emisi karbon global nomor dua terbesar di dunia, mendorong pengelolaan yang berkelanjutan atas hutan-hutan tropis yang masih tersisa di dunia, dan membuka jalan baru menuju pertumbuhan dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung kepada hutan. Pelajaran dari Madre de Dios, Kutai Barat dan Maï-Ndombe telah menunjukkan seperti apa jalan yang benar itu. Dilengkapi dengan pemahaman dan visi baru, kami dapat melangkah maju dengan percaya diri menjadikan REDD+ tepat bagi kesehatan planet dan penduduknya.



**NAMUN NAMUN KERJA WWF DI PERU, INDONESIA DAN KONGO TELAH MENUNJUKKAN BAHWA REDD+ BUKAN SOLUSI MELAINKAN ALAT. IA MEMAINKAN PERAN KRITIS DALAM MENEMUKAN SOLUSI, DAN TIDAK BOLEH DIKUCILKAN DARI KONTEKS DAN PROSES YANG LAIN**

**INILAH SAAT YANG MENENTUKAN BAGI REDD+. SELAMA TETAP ADA DI JALUR YANG BENAR, MEKANISME INI AKAN MEMBERIKAN PELUANG YANG SANGAT BESAR BARI PELESTARIAN HUTAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA TROPIS, YANG BELUM PERNAH KITA LIHAT**

# SUMBER-SUMBER REDD+ WWF

Sumber-sumber ini disusun dan diproduksi secara langsung oleh atau dengan dukungan Proyek RPAN WWF yang didanai Norad.

## PUBLIKASI DAN DOKUMEN

### MRV

Science Solutions to Policy Challenges for evolving REDD+ MRV requirements: report from a multi-stakeholder workshop (in press)

Assessing risks to forest cover and carbon stocks: A review of tools and approaches to compare business-as-usual to REDD+ scenarios, 2013  
[bit.ly/138zC4E](http://bit.ly/138zC4E)

Analysis of Waveform Lidar Data Using Shape-Based Metrics, 2013  
[bit.ly/1fivBo5](http://bit.ly/1fivBo5)

A framework for integrating biodiversity concerns into national REDD+ programmes, 2012  
[bit.ly/18GBmep](http://bit.ly/18GBmep)

From project based to nested REDD+: Monitoring, reporting and verifying (MRV) standards for carbon accounting, 2012  
[bit.ly/117Wvbp](http://bit.ly/117Wvbp)

Reference Levels and Payments for REDD+: Lessons from the recent Guyana-Norway Agreement, 2012  
[bit.ly/12fgQzz](http://bit.ly/12fgQzz)

Developing the tools to make REDD+ work, 2011  
[bit.ly/10xCGem](http://bit.ly/10xCGem)



© WWF/SIMON RAWLINS

### PASYARAKAT ADAT/HAM

Community Tenure and REDD+, 2012  
[bit.ly/13fywXl](http://bit.ly/13fywXl)

Capacity Building Materials on REDD+ for Indigenous Peoples and Local Communities, 2011  
[bit.ly/15fj1Qn](http://bit.ly/15fj1Qn)

Free, Prior, Informed Consent & REDD+: Guidelines and Resources, 2011  
[bit.ly/16LKhnM](http://bit.ly/16LKhnM)

Factsheet: Indigenous People, Local Communities and REDD+, 2011  
[bit.ly/115AYh1](http://bit.ly/115AYh1)

### STANDAR-STANDAR PROYEK

Forest Carbon Standards: A WWF Assessment Guide, 2010  
[bit.ly/12LFL8G](http://bit.ly/12LFL8G)

### PEMBIAYAAN

Unlocking Forest Bonds, 2011  
[bit.ly/16sZ0HC](http://bit.ly/16sZ0HC)

### REDD+ NASIONAL/REGIONAL

Building REDD+ for People and Nature: from lessons learned in Indonesia, Peru and the DRC to a new vision for REDD+, 2013  
[bit.ly/BuildREDDreport](http://bit.ly/BuildREDDreport)

Executive Summary of Report: Building REDD+ for People and Nature (also available in Bahasa)  
[bit.ly/BuildREDDreport](http://bit.ly/BuildREDDreport)

Updated Edition: WWF Guide to Building REDD+ Strategies: a toolkit for REDD+ practitioners around the globe, 2013  
[bit.ly/REDDguide](http://bit.ly/REDDguide)

REDD+ Country Profiles, 2013  
[bit.ly/1dqN5Lp](http://bit.ly/1dqN5Lp)

Bolivia – [bit.ly/12mlAAN](http://bit.ly/12mlAAN)  
Cameroon – [bit.ly/172hy2f](http://bit.ly/172hy2f)  
Democratic Republic of Congo – [bit.ly/180KrZI](http://bit.ly/180KrZI)  
Peru – [bit.ly/1cjRy4H](http://bit.ly/1cjRy4H)  
Vietnam – [bit.ly/1d2VuJd](http://bit.ly/1d2VuJd)

REDD+ for People and Nature: A case study of an integrated approach to REDD+ readiness in Mai-Ndombe, DRC, 2012 (also available in Spanish and French)  
[bit.ly/1auB8mp](http://bit.ly/1auB8mp)

REDD+ Developments in the Guianas, 2012  
[bit.ly/18wvqgd](http://bit.ly/18wvqgd)

Factsheet: REDD+ in Laos Xe Pian, 2012  
[bit.ly/11uSZdz](http://bit.ly/11uSZdz)

Développement d'un Programme REDD+ intégré sur le territoire de Bolobo, RDC – Réflexions sur la structure organisationnelle et financière, 2012  
[bit.ly/18wvlnZ](http://bit.ly/18wvlnZ)

Promoviendo REDD+ para el desarrollo sostenible de Madre de Dios, 2012  
[bit.ly/16mKDYh](http://bit.ly/16mKDYh)

Profile: Maintaining the Green Heart of Africa's forests for people and the planet, 2011  
[bit.ly/130yMum](http://bit.ly/130yMum)

Profile: Maintaining the Heart of Borneo's forests for people and the planet, 2011  
[bit.ly/142AnO2](http://bit.ly/142AnO2)

Profile: Maintaining the Amazon's forests for people and the planet, 2011  
[bit.ly/12LG9Ef](http://bit.ly/12LG9Ef)

Lessons from REDD+ Preparedness in Colombia, Guyana, Indonesia and Peru (linking WWF FCI past and new programmes), 2010  
[bit.ly/11mR1pA](http://bit.ly/11mR1pA)

Multiplier and Distributive Effects of large-Scale REDD+ Policies in Mexico, 2010  
[bit.ly/18qkAzr](http://bit.ly/18qkAzr)

### MAKALAH KEBIJAKAN

WWF REDD+ Expectations for UNFCCC, Bonn Meeting, 2013  
[bit.ly/1d2TXCJ](http://bit.ly/1d2TXCJ)

WWF Expectations for UNFCCC, Bonn Meeting, 2013  
[bit.ly/180IU63](http://bit.ly/180IU63)

WWF REDD+ Expectations for UNFCCC-COP18, 2012  
[bit.ly/10ExTVc](http://bit.ly/10ExTVc)

WWF REDD+ MRV External Brief for UNFCCC COP18, 2012  
[bit.ly/19jelw8](http://bit.ly/19jelw8)

WWF REDD+ Reference Level External Brief for UNFCCC COP18, 2012  
[bit.ly/16mJJLA](http://bit.ly/16mJJLA)

WWF REDD+ Finance External Brief for UNFCCC COP18, 2012  
[bit.ly/18wuwon](http://bit.ly/18wuwon)

WWF Expectations for the UNFCCC Bangkok Meeting, 2012  
[bit.ly/12LF1jS](http://bit.ly/12LF1jS)

WWF Expectations for UNFCCC, Bonn Meeting, 2012  
[bit.ly/1532648](http://bit.ly/1532648)

### KESEPAKATAN UNFCCC

WWF Submission to AWG LCA: Finance, 2012  
[bit.ly/12LF7YS](http://bit.ly/12LF7YS)

WWF Submission to SBSTA: Views on robust, transparent national forest monitoring systems for REDD+, 2012  
[bit.ly/17mikcP](http://bit.ly/17mikcP)

Climate Action Network (including WWF's input): CAN-International submission on how to address drivers of deforestation and forest degradation, 2012  
[bit.ly/18YG2J4](http://bit.ly/18YG2J4)

WWF Submission to SBSTA: Methodological guidance for activities relating to REDD+ (safeguards & RL/REL), 2011  
[bit.ly/117WnJF](http://bit.ly/117WnJF)

### LAIN-LAIN

Supporting materials from Building REDD+ Reference Levels: International workshop co-hosted by WWF and the World Bank's Forest Carbon Partnership Facility, 2013  
[bit.ly/11bhMwX](http://bit.ly/11bhMwX)

Supporting materials from Terrestrial Carbon Accounting Certificate programme, developed in partnership with Tropical Forest Group, UC San Diego – Sustainability Solutions Institute, and WWF, 2013  
[bit.ly/18HZDNx](http://bit.ly/18HZDNx)

Living Forest Report, Chapter 3 – Forest & Climate & ZNDD 2020, 2012  
[bit.ly/eHux1W](http://bit.ly/eHux1W)

REDD+ Five Guiding Principles  
[bit.ly/18wvEby](http://bit.ly/18wvEby)

**More WWF REDD+ related publications available here:**  
[bit.ly/16mKTGX](http://bit.ly/16mKTGX)

### ALAT-ALAT PELATIHAN REDD+

REDD+ Community: A free, open online knowledge sharing and community platform for REDD+ practitioners around the world  
[reddcommunity.org](http://reddcommunity.org)

REDD+ Learning Sessions: An archive of free webinar presentations given monthly by REDD+ experts on key issues  
[bit.ly/13WO8AY](http://bit.ly/13WO8AY)

REDD+ Inspiring Practices: Inspiring Practices capture the valuable knowledge and experiences from REDD+ efforts that can help improve, replicate and scale up REDD+ work around the globe  
[reddcommunity.org/inspiring-practices](http://reddcommunity.org/inspiring-practices)

## SUMBER-SUMBER LANJUTAN

REDD+ Inspiring Practice: Developing an Emissions Reduction Programme Idea Note in the Democratic Republic of Congo, 2013  
[bit.ly/1bvTlGf](http://bit.ly/1bvTlGf)

REDD+ Inspiring Practice: Development of the Amazonian Indigenous REDD+ Proposal, 2013 (also available in French/Spanish)  
[bit.ly/11mRfNj](http://bit.ly/11mRfNj)

REDD+ Inspiring Practice: Fostering Participation and Cross-Cultural Dialogue, 2013 (also available in French/Spanish)  
[bit.ly/117XjNW](http://bit.ly/117XjNW)

REDD+ Inspiring Practice: Mapping Madre de Dios, 2013 (also available in French/Spanish)  
[bit.ly/13fzrqC](http://bit.ly/13fzrqC)

From the Tree of Practices to the Forest of Knowledge: A guide to identifying, capturing, sharing and communicating REDD+ Inspiring Practices, 2013  
[bit.ly/18wvUaN](http://bit.ly/18wvUaN)

REDD+ Learning Video: Engaging forest stewards in REDD+ dialogues, 2013 (also available in Spanish)  
[bit.ly/117XsB8](http://bit.ly/117XsB8)

Access all WWF REDD+ learning tools at: [bit.ly/11062Of](http://bit.ly/11062Of)

### BERITA-BERITA REDD+

REDD+ Resource Digest: a weekly email round-up of REDD+ news and information from around the world representing varying perspectives, available free to subscribers  
[conta.cc/Zc1ZSp](http://conta.cc/Zc1ZSp)

Canopy: FCP's quarterly newsletter that provides the latest news and information on WWF's REDD+ related activities, available free to subscribers  
[conta.cc/Zc1ZSp](http://conta.cc/Zc1ZSp)

Access archive of all issues of these publications at: [conta.cc/Zc1ZSp](http://conta.cc/Zc1ZSp)

Subscribe to these electronic publications at:  
[bit.ly/11uUbh4](http://bit.ly/11uUbh4)

More REDD+ news and info at Forest and Climate News:  
[bit.ly/15fkLZK](http://bit.ly/15fkLZK)

### VIDEO

Video: REDD+ in DRC – Local Action, Global Impact  
[bit.ly/15fkOoy](http://bit.ly/15fkOoy)

Video: REDD+ for People and Nature – Maï-Ndombe, DRC  
[bit.ly/13fzUJk](http://bit.ly/13fzUJk)

REDD+ Learning Video: Engaging forest stewards in REDD+ dialogues (also available in Spanish)  
[bit.ly/117XsB8](http://bit.ly/117XsB8)

Dapatkan seluruh video mengenai REDD+ dari WWF di  
[www.youtube.com/wwfforestclimate](http://www.youtube.com/wwfforestclimate)

### SUMBER-SUMBER LAIN

WWF Forest and Climate website  
[www.panda.org/forestclimate](http://www.panda.org/forestclimate)

Forest and Climate Priorities  
[bit.ly/142BCww](http://bit.ly/142BCww)

Forest Climate Activities and Projects  
[bit.ly/1106qfF](http://bit.ly/1106qfF)

WWF Forest and Climate Twitter feed  
[www.twitter.com/wwfforestcarbon](http://www.twitter.com/wwfforestcarbon)

REDD+ Community Twitter feed  
[www.twitter.com/REDDCommunity](http://www.twitter.com/REDDCommunity)



### KREDIT

#### PENULIS:

Gisela Telis, Jennifer Ferguson-Mitchell, Breen Byrnes; dibantu oleh Naikoa Aguilar-Amuchastegui, Josefina Braña-Varela, Bruce Cabarle, Paul Chatterton, Minnie Degawan, Pablo Gutman, Elaine Pura, Derek Thompson, WWF-DRC, WWF-Peru dan WWF-Indonesia

#### EDITOR PRODUKSI:

Jennifer Ferguson-Mitchell dan Breen Byrnes

Desain: Fuszion

Publikasi ini diproduksi oleh Forest and Climate Programme, WWF.

100%  
DAUR ULANG



Forest and Climate Programme WWF bertujuan memastikan pelestarian hutan-hutan tropis sebagai penyimpan karbon dijamin oleh pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan (green economic development) sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, iklim dan keragaman hayati secara transformatif.

[panda.org/forestclimate](http://panda.org/forestclimate)

 / [wwf](https://www.facebook.com/wwf)

 / [wwfforestcarbon](https://twitter.com/wwfforestcarbon)

WWF mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Norwegia untuk dukungannya melalui hibah yang dikelola oleh Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), untuk kegiatan-kegiatan WWF yang dipaparkan dalam publikasi ini. Pandangan dalam publikasi ini tidak merefleksikan kebijakan pemerintah Norwegia atau afiliasinya.

#### UNTUK INFORMASI LEBIH JAUH, HUBUNGI:

Pogram Hutan dan Iklim WWF  
[forestclimate@wwfus.org](mailto:forestclimate@wwfus.org)

Hak cipta foto dan grafis © WWF, atau dapat digunakan dengan ijin.  
Teks dapat diperoleh di bawah lisensi Creative Commons licence.



#### Kenapa kami ada di sini

Untuk menghentikan degradasi lingkungan hidup planet ini dan membangun masa depan bagi kehidupan manusia yang selaras dengan alam

[www.panda.org/forestclimate](http://www.panda.org/forestclimate)

© WWF Registered Trademark Owner © 1986, WWF-World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund), Gland, Switzerland

FSC info here